

**DIPLOMASI PUBLIK TALIBAN MELALUI MEDIA DIGITAL SEBAGAI
UPAYA MEMBANGUN CITRA POSITIF PASCA PENGAMBILALIHAN
KEKUASAAN DI AFGHANISTAN TAHUN 2021-2022**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

Fitry Wahyuni

19323033

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**DIPLOMASI PUBLIK TALIBAN MELALUI MEDIA DIGITAL SEBAGAI
UPAYA MEMBANGUN CITRA POSITIF PASCA PENGAMBILALIHAN
KEKUASAAN DI AFGHANISTAN TAHUN 2021-2022**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

Fitry Wahyuni

19323033

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**Diplomasi Publik Taliban Melalui Media Digital Sebagai Upaya
Membangun Citra Positif Pasca Pengambilalihan Kekuasaan Di
Afghanistan Tahun 2021-2022**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

18 Januari 2023

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

1. Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
2. Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
3. Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.

Tanda Tangan

[Handwritten signatures]

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 18 Januari 2023



Fitry Wahyuni

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR	vii
DAFTAR SINGKATAN	ix
Abstrak	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan penelitian	5
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara	12
1.8 Metode Penelitian	13
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	<i>13</i>
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	<i>13</i>
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	<i>14</i>
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	<i>14</i>
1.9 Sistematika Pembahasan	15
BAB 2 MEDIA SOSIAL DAN POLITIK TALIBAN DI AFGHANISTAN	16
2.1 Pengambilalihan Kekuasaan di Afghanistan Tahun 2021	16
<i>2.1.1 Sejarah Lahirnya Gerakan Taliban</i>	<i>16</i>
<i>2.1.2 Kemenangan Taliban di Afghanistan Tahun 2021</i>	<i>18</i>
2.2 Taliban dan Propaganda Media Digital	29
<i>2.2.1 Media Digital dalam Perjuangan Politik Taliban</i>	<i>29</i>
<i>2.2.2 Urgensi Diplomasi Publik Taliban melalui Media Digital</i>	<i>32</i>
BAB 3 ANALISIS DIPLOMASI PUBLIK TALIBAN MELALUI MEDIA DIGITAL PASCA PENGAMBILALIHAN KEKUASAAN	34
3.1 Media Digital Pemerintah Taliban	34
<i>3.1.1 Situs Pemerintah Taliban</i>	<i>36</i>
<i>3.1.2 Channel Youtube</i>	<i>38</i>
<i>3.1.3 Twitter</i>	<i>39</i>

3.2 Analisis Implementasi Tiga Dimensi Diplomasi Publik Mark Leonard	43
BAB 4 PENUTUP	52
<i>4.1 Kesimpulan</i>	52
<i>4.2 Rekomendasi</i>	53
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

Grafik 2.1	Skor Corruption Perception Index Afghanistan	26
Diagram 2.1	Pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) di Afghanistan	24
Diagram 3.1	Tweet Berdasarkan Jenis Akun @Alemarahenglish	40
Diagram 3.2	Tweet Berdasarkan Sentimen Akun @Alemarahenglish	40
Diagram 3.3	Tweet Berdasarkan Jenis Akun @Zabehulah_M33	42
Diagram 3.4	Tweet Berdasarkan Sentimen Akun @Zabehulah_M33	42
Diagram 3.5	Tweet Berdasarkan Jenis Akun @QaharBalkhi	43
Diagram 3.6	Tweet Berdasarkan Sentimen Akun @QaharBalkhi	43
Gambar 3.1	Headline Penggunaan Seluler, Internet, dan Media Sosial di Afghanistan	34
Gambar 3.2	Laman resmi Emirat Islam Afghanistan ‘Al-Emarah’	37
Gambar 3.3	Laman Kementerian Luar Negeri Emirat Islam Afghanistan	38
Gambar 3.4	Channel Youtube Kementerian Luar Negeri Afghanistan	39
Gambar 3.5	Laman Twitter @Alemarahenglish	39
Gambar 3.6	Laman Twitter @Zabehulah_M33	41
Gambar 3.7	Laman Twitter @QaharBalkhi	42
Gambar 3.8	Respon Zabihullah Mujahid atas Laporan Dewan HAM PBB	45
Gambar 3.9	Unggahan @Zabehulah_M33 mengenai Hak Perempuan	46
Gambar 3.10	Unggahan @QaharBalkhi terkait HAM	48
Gambar 3.11	Unggahan @Zabehulah_M33 terkait HAM	48
Gambar 3.12	Respon Zabihullah Mujahid Perihal Aktivitas Media	51

DAFTAR SINGKATAN

ANDSF	: <i>The Afghan National Defense and Security Forces</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
IEA	: <i>Islamic Emirate of Afghanistan</i>
LDA	: <i>Latent Dirichlet Allocation</i>
MFC	: <i>Media Freedom Coalition</i>
MoFA	: <i>Ministry of Foreign Affairs</i>
NATO	: <i>The North Atlantic Treaty Organization</i>
OKI	: Organisasi Kerja Sama Islam
PBB	: Perserikatan Bangsa-bangsa
RSF	: <i>Reporters Without Borders</i>
SIGAR	: <i>Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction</i>
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
UNAMA	: <i>The United Nations Assistance Mission in Afghanistan</i>

Abstrak

Setelah 20 tahun berperang melawan invasi Amerika Serikat dan sekutunya, Taliban berhasil mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada 15 Agustus 2021. Kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan menimbulkan banyak kontroversi terutama mengenai hak asasi manusia. Taliban mencoba memperbaiki citra negatifnya di masa lalu dengan meningkatkan soft power melalui diplomasi publik dengan memanfaatkan media digital untuk memperkuat pesan-pesan mereka kepada publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Taliban melakukan diplomasi publik melalui media digital dalam upaya membangun citra positif pasca pengambilalihan kekuasaan di Afghanistan. Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi publik Mark Leonard yang terdiri dari tiga dimensi; *news management*, *strategic communication*, dan *relationship building*. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif menggunakan literatur melalui pencarian online, khususnya media digital yang dimiliki oleh Taliban. Penelitian ini menemukan bahwa Taliban aktif melakukan diplomasi publik dengan menggunakan media digital untuk merespon serangan narasi dan mempromosikan kebijakan sebagai upaya membangun citra positif.

Kata Kunci: Afghanistan, Diplomasi Publik, Taliban

Abstract

After 20 years of fighting against the invasion of the United States and its allies, the Taliban succeeded in taking power in Afghanistan on August 15, 2021. The return of the Taliban to power caused a lot of controversy, especially regarding human rights. The Taliban tried to improve their negative image by increasing soft power through public diplomacy and utilizing digital media to strengthen their messages to the public. This study aims to analyze how the Taliban conducts public diplomacy through digital media in an effort to build a positive image after the takeover of power in Afghanistan. This research uses Mark Leonard's concept of public diplomacy, which consists of three dimensions: news management, strategic communication, and relationship building. The method used is a qualitative method using literature through online searches, especially digital media owned by the Taliban. This research finds that the Taliban actively engages in public diplomacy by using digital media to respond to narrative attacks and promote policies in an effort to build a positive image.

Keywords: Afghanistan, Public Diplomacy, Taliban

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara memiliki cara yang berbeda-beda dalam meraih kepentingan nasionalnya. Untuk meraih kepentingan tersebut, sebuah negara harus memiliki *power* atau kekuatan. Ada dua macam *power*, bersifat destruktif (*hard power*) dan non destruktif (*soft power*) (Bainus and Rachman 2018). *Hard power* menjadi pilihan yang populer untuk mencapai kepentingan nasional pada masa Perang Dunia. Namun, saat ini pendekatan *soft power* lebih banyak dipilih oleh negara dan aktor non negara untuk mencapai kepentingannya. Tujuan dari penggunaan *soft power* adalah membentuk preferensi orang lain bukan melalui paksaan, tetapi dengan rayuan melalui cara-cara diplomatik (Schéré 2021).

Salah satu instrumen *soft power* adalah diplomasi publik. Jan Melissen (2006) melihat diplomasi publik sebagai usaha pemerintah untuk mempengaruhi orang atau organisasi lain di luar negaranya melalui cara-cara yang positif sehingga dapat mengubah cara pandang orang tersebut terhadap suatu negara. Tidak seperti diplomasi tradisional yang cenderung tertutup dan memiliki jangkauan terbatas, diplomasi publik bersifat transparan dengan jangkauan yang lebih luas. Sasaran diplomasi publik yang sangat luas dan beragam mengharuskan pemanfaatan semua saluran komunikasi. Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), jumlah saluran komunikasi menjadi beragam, kompleks, dan rumit (Hennida 2009).

TIK merupakan modalitas yang sifatnya strategis dan telah lama digunakan secara efektif dalam mempererat hubungan diplomatik. Pada tahun 1963, *International Telecommunication Union* menyelenggarakan pertemuan diplomatik pertama yang menggunakan telekonferensi. Selanjutnya, pada tahun 1992, untuk pertama kalinya email masyarakat sipil digunakan untuk melobi dalam negosiasi pada *the Earth Summit* di Rio de Janeiro (Jora 2022). Di era digital, akses terhadap informasi, transparansi, dan interaksi antar aktor menjadi jauh lebih besar. Media digital menjadi salah satu alat diplomasi yang penting. Ada banyak platform online yang disediakan oleh media digital untuk melakukan komunikasi tanpa syarat. Platform online tersebut memfasilitasi dialog alih-alih monolog, hal ini kemudian membantu para aktor memahami reaksi publik terhadap kebijakan tertentu (Rashica 2018).

Pentingnya media digital sebagai alat strategis dalam diplomasi publik sangat disadari oleh Taliban. Istilah “Taliban” berasal dari bahasa Pashtun yang berarti murid atau santri yang dikhususkan kepada laki-laki. Pada awalnya, Taliban merupakan sebuah kelompok pelajar yang didirikan pada tahun 1994 di Provinsi Kandahar. Kelompok ini dipimpin oleh Mullah Mohammad Omar yang merupakan seorang guru dari madrasah Sang-i Hisar di Provinsi Kandahar Utara (Sahrasad et al. 2021). Pada tahun 1996, Taliban berhasil menguasai Kabul dan mendeklarasikan Keamiran Islam Afghanistan. Ketika berkuasa, Taliban mengadopsi hukum Islam dalam pembuatan perundang-undangan dan menjalankan sistem pemerintahan. Kelompok ini menerapkan hukum berdasarkan pemahaman Islam yang ultra-konservatif. Sayangnya, sejumlah kebijakan mereka

mengundang kontroversi dan membuat mereka tidak disukai oleh masyarakat Afghanistan maupun komunitas internasional (Aswar 2021).

Citra buruk rezim Taliban terutama di negara-negara Barat menjadi alasan utama mengapa Taliban menggencarkan diplomasi publik melalui media digital. Melalui media digital Taliban berusaha mengganti wajah lamanya yang brutal dan tidak mengindahkan hak asasi manusia menjadi wajah baru yang lebih moderat dan cinta damai (Kompas.com 2021). Melalui media digital mereka mencoba untuk membangun *public relations* dengan menyebarkan nilai-nilai positif melalui pesan yang mereka sampaikan. Strategi ini menjadi salah satu upaya Taliban untuk meraih legitimasi dari negara-negara di dunia (Kumparan News 2021). Namun ini bukanlah suatu hal yang mudah bagi Taliban karena citra buruk di masa silam terlanjur menyandera kelompok tersebut.

Setelah 20 tahun berperang melawan invasi Amerika Serikat dan NATO (*North Atlantic Treaty Organization*), Taliban berhasil mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada 15 Agustus 2021. Di fase kedua kepemimpinannya, Taliban mencoba menunjukkan wajah baru yang lebih moderat, toleran, dan diplomatis (Ahmadzai and Ghosn 2022). Media digital menjadi alat yang dimanfaatkan oleh Taliban untuk membangun citra positifnya, tidak hanya di Afghanistan tetapi juga di kancah internasional. Taliban secara terbuka menyatakan bahwa mereka akan membuka diri untuk bekerja sama dengan negara-negara lain, mengingat dukungan internasional sangat dibutuhkan dalam upaya rekonsiliasi dan pembangunan Afghanistan di masa mendatang.

Taliban terus berusaha mengembangkan penggunaan media digital sebagai sarana untuk meningkatkan kegiatan diplomasi publik dan memperbaiki citranya.

Keinginan Taliban untuk meningkatkan citra positifnya melalui media bukanlah keinginan yang muncul baru-baru ini. Pada tahun 2005, Taliban meluncurkan laman resmi Emirat Islam Afghanistan ‘Al Emarah’ yang kini mempublikasikan kontennya dalam lima bahasa yakni Inggris, Arab, Pashtun, Dari, dan Urdu (Atiq 2021). Kemudian, akun Twitter @alemarahweb mulai memposting tweet dalam bahasa Inggris pada bulan Mei 2011 (Bernatis 2014).

Kini Taliban sudah sangat terampil dalam berdiplomasi. Setelah berhasil mengambil alih pemerintahan, para militan Taliban justru beramai-ramai mengunggah foto dan video yang menampilkan bahwa mereka adalah orang biasa yang ramah: bermain bom-bom car, makan es krim dan berolahraga (Setowara 2021). Namun upaya Taliban dalam melakukan rebranding tidak semudah yang dibayangkan. Kebangkitan Taliban ini memicu kekhawatiran masyarakat Afghanistan dan dunia internasional karena merasa trauma dengan kepemimpinan Taliban di era 1990-an. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Taliban dan menempatkan mereka pada titik krusial yang masih susah diprediksi masa depannya.

Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis akan membahas bagaimana strategi diplomasi publik Taliban melalui media digital sebagai upaya untuk membangun citra positif dan mencari dukungan internasional pasca pengambilalihan kekuasaan di Afghanistan tahun 2021. Topik ini menjadi menarik karena pada kepemimpinan sebelumnya Taliban sangat menolak penggunaan teknologi informasi dan media karena dinilai bertentangan dengan syariat Islam. Namun, saat ini Taliban menjadikan media digital sebagai senjata

yang ampuh untuk menjinakkan oposisi, membangun kekuasaan dan menyampaikan pesan-pesan politiknya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana diplomasi publik Taliban melalui media digital dalam upaya membangun citra positif pasca pengambilalihan kekuasaan di Afghanistan tahun 2021-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi peran media digital dalam perjuangan politik Taliban di Afghanistan.
2. Untuk menganalisis bagaimana diplomasi publik Taliban melalui media digital dalam upaya membangun citra positif pasca pengambilalihan kekuasaan di Afghanistan tahun 2021-2022.

1.4 Cakupan penelitian

Cakupan penelitian yang digunakan penulis terkait dengan topik diatas yaitu penulis akan mengidentifikasi bagaimana peran media digital dalam perjuangan politik Taliban di Afghanistan. Selanjutnya, penulis juga akan menganalisis aktivitas diplomasi publik Taliban melalui beberapa platform media digital mereka diantaranya website, Youtube, dan Twitter. Terkait pemilihan waktu, penelitian ini akan berfokus pada kurun waktu 2021 hingga 2022. Periode

ini dipilih karena dalam periode tersebut Taliban mulai gencar membangun citra positifnya setelah berhasil mengambil alih kekuasaan pada bulan Agustus 2021.

1.5 Tinjauan Pustaka

Demi memperoleh landasan ilmiah perihal penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Jurnal pertama berjudul *Social Media and Disinformation in War Propaganda: How Afghan Government and the Taliban use twitter* yang ditulis oleh Hazrat M. Bahar (2020). Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemerintahan Afghanistan dan Taliban menggunakan media sosial Twitter untuk melakukan propaganda. Penggunaan media sosial dalam dunia politik sangat krusial untuk menyebarkan (dis)informasi, mengumpulkan dukungan dan memanipulasi opini publik. Di Afghanistan, hampir semua kementerian, gubernur provinsi, organisasi semi-pemerintah dan independen, anggota parlemen dan politisi memiliki akun media sosial. Di sisi lain, Taliban juga sangat aktif menggunakan media sosial seperti Twitter dan Facebook untuk melaporkan serangan mereka terhadap pasukan keamanan, membuat pernyataan dan menyebarkan propaganda. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan teori propaganda dan media frame. Penelitian ini fokus menganalisis disinformasi dengan melakukan pemeriksaan secara silang terhadap 952 tweet yang bersumber dari akun twitter Kementerian Pertahanan Afghanistan (@MoDAfghanistan) dan Zabihullah Mujahid (@Zabehulah_M33) yang merupakan salah satu juru bicara Taliban. Akun Twitter kedua pihak informasi

reguler tentang perang dan jumlah korban yang ditimbulkan satu sama lain. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah adanya perbedaan informasi yang disebarkan oleh kedua pihak yang bertikai. Terorisme dan jihad adalah kerangka dominan yang digunakan oleh masing-masing pihak (Bahar 2020).

Selanjutnya adalah jurnal yang berjudul *Reframing the Taliban Insurgency in Afghanistan: New Communication and Mobilization Strategies for the Twitter Generation* yang ditulis oleh David Drissel (2014). Jurnal ini membahas mengenai bingkai keberpihakan dan strategi komunikasi dengan melakukan analisis terhadap konten tweet dan blog terbaru yang ditulis oleh aktivis Taliban. Dalam menganalisis strategi komunikasi baru Taliban, penelitian ini menggunakan teori *framing* dan teori identitas kolektif. Peneliti mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis lebih dari 400 tweet (mikro-blog) dan weblog bergaya esai selama rentang waktu Februari-Juni 2012. Taliban nampaknya berusaha memobilisasi sumber dukungan baru dari apa yang disebut ‘Generasi Twitter’, yaitu orang-orang relatif lebih muda dan secara ekstensif memanfaatkan situs web media sosial dan TIK lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa aktivis Taliban di Afghanistan memanfaatkan mode komunikasi inovatif seperti media sosial untuk menyebarluaskan sikap politik dan membingkai gerakan sosial mereka dalam fraseologi transnasional Islam radikal, anti-imperialisme, penentuan nasib sendiri dan hak asasi manusia secara universal. Dalam hal ini Taliban berusaha untuk menyesuaikan kerangka diskursif mereka dengan berbagai ideologi transnasional yang beresonansi tidak hanya dengan pendukung yang ada di kawasan Asia Tengah, Asia Selatan dan Timur Tengah tetapi juga publik di Barat (Drissel 2014).

Berikutnya adalah jurnal yang berjudul *The Taliban and Twitter: Tactical Reporting and Strategic Messaging* yang ditulis oleh Vincent Bernatis (2014). Seperti kedua jurnal sebelumnya, jurnal ini juga menganalisis media sosial Twitter milik Taliban. Perbedaannya adalah penelitian ini fokus mengidentifikasi peran Twitter bagi Taliban dalam mengerahkan kontrol atas informasi berbasis internet. Peneliti mencoba menganalisis tweet Taliban non-administratif dalam bahasa Inggris pada akun @alemarahweb pada musim pertempuran tahun 2012. Data dari akun Twitter Taliban akan dikomparasikan dengan data yang dikumpulkan oleh sumber-sumber alternatif, ISAF dan iCasualties.org. Teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori komunikasi dan hubungan masyarakat. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni aktivitas media sosial Taliban menjadi front yang semakin penting dalam perang di Afghanistan. Sebagian besar upaya Taliban dalam mengadopsi dan bereksperimen dengan platform online untuk menyampaikan narasi politiknya telah berhasil bersaing dengan Barat (Bernatis 2014).

Jika ketiga jurnal di atas menganalisis postingan di media sosial Taliban, jurnal keempat yang berjudul *Peran Akun Twitter Public Figure Indonesia dalam Membentuk Opini Publik tentang Citra Positif atas Kemenangan Taliban – Afghanistan* ditulis oleh Ujang Habibi dan Hardinal Pratama (2021), menganalisis dua akun *public figure* Indonesia yaitu Fadli Zon dan Hidayat Nur Wahid dalam membentuk opini publik yang membangun citra positif Taliban. Untuk menganalisis kasus di atas, peneliti menggunakan teori framing. Peneliti mengambil 7 buah opini dari akun @fadlizon pada rentang waktu 16-31 Agustus 2021. Sedangkan pada akun @hnurwahid, peneliti mengambil 4 opini yang dianggap telah membentuk opini mengenai citra positif Taliban di Twitter. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga pola yang membentuk opini publik yaitu: pertama, menciptakan isu (*agenda setting*); membuat sejumlah pemberitaan mengenai Taliban terkait dengan citra positifnya. Kedua, melakukan pembedaan (*framing*) dengan menyuguhkan teks pandangan opini. Ketiga, mengarahkan pandangan publik pada perspektif positif mengenai Taliban dengan menyebarkan informasi terkait isu yang sedang terjadi agar pandangan tersebut tercipta di tengah masyarakat. Opini bahwa pemerintahan Taliban di Afghanistan bukanlah termasuk organisasi teroris dibentuk pada akun Twitter Hidayat Nur Wahid dan Fadli Zon. Itu sebabnya, masyarakat diajak untuk tidak *phobia* terhadap Islam (Habibi and Pratama 2021).

Penelitian terakhir adalah jurnal yang berjudul *Inquest of Current Situation in Afghanistan Under Taliban Rule Using Sentiment Analysis and Volume Analysis*. Jurnal ini ditulis oleh Ernesto Lee, Furqan Rustam, Imran Ashraf, Patrick Benard Washington, Manideep Narra dan Rahman Shafique (2022). Masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu situasi terkini di Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban. Peneliti menggunakan analisis sentimen dan analisis volume dengan metode LDA (*Latent Dirichlet Allocation*) untuk menganalisis tweet positif dan negatif. Dari analisis tersebut ditemukan bahwa tweet negatif sebagian besar berasal dari India dan AS. sedangkan tweet positif banyak berasal dari Pakistan dan Afghanistan. Topik yang diekstraksi melalui LDA menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Afghanistan merasa puas dengan pengambilalihan pemerintahan oleh Taliban. Sebaliknya, tweet negatif menunjukkan kekhawatiran AS di Afghanistan (Lee et al. 2022).

Berdasarkan kelima jurnal di atas, dapat diketahui bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik membahas mengenai diplomasi publik Taliban melalui media digital sebagai upaya membangun citra positif setelah kembali memegang kekuasaan di Afghanistan tahun 2021. Selain itu, sampai hari ini belum ada skripsi ataupun tesis yang membahas tentang topik tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang bagaimana Taliban menggunakan media digital sebagai instrumen diplomasi publik untuk membangun citra positifnya pasca pengambilalihan kekuasaan di Afghanistan pada rentang waktu tahun 2021 hingga 2022. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada media digital seperti website, Twitter, dan Youtube yang digunakan oleh Taliban untuk menyampaikan narasi-narasi politiknya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Mark Leonard dalam buku *Public Diplomacy* menjelaskan bahwa diplomasi publik merupakan suatu cara untuk membangun hubungan dengan negara lain melalui pemahaman atas negara, budaya, dan masyarakat asing, serta untuk memperbaiki salah persepsi dalam hubungan internasional. Leonard menyarankan agar pemerintah menjalankan diplomasi publik yang multidimensi untuk mencapai keberhasilan diplomasi publik. Terdapat tiga dimensi utama diantaranya; pertama, *news management* adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaku diplomasi publik dalam melakukan pemberitaan atau memberikan respon terhadap isu atau berita secara cepat dan luas melalui media. Kedua, *strategic communication* merupakan bentuk kampanye politik yang dilakukan oleh pelaku diplomasi publik untuk mempengaruhi persepsi publik dengan menyebarkan

nilai-nilai positif melalui pesan yang mereka sampaikan. Ketiga, *Relationship Building* merupakan upaya mengembangkan hubungan jangka panjang dengan pihak-pihak tertentu melalui beasiswa, pertukaran, pelatihan, seminar, konferensi, maupun pemberian akses ke saluran media (Leonard 2002).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai hal termasuk dalam berdiplomasi. Dalam perspektif diplomasi publik, teknologi digital dan media sosial dapat berguna untuk meningkatkan kegiatan diplomasi publik pada level domestik maupun internasional. Media digital menjadi salah satu alat yang penting untuk menyebarkan informasi, membentuk citra positif negara, dan mempengaruhi persepsi publik. Media digital dengan fitur interaktifnya dapat menghasilkan dialog yang seolah-olah berkesinambungan antara pemerintah dan publik. Percakapan dua arah ini memungkinkan negara untuk menyesuaikan kembali fokus agenda mereka, mengurangi kesalahan informasi, dan meningkatkan saling pengertian. Fitur inilah yang memungkinkan media digital mewujudkan tujuan diplomasi publik dengan cara yang berbeda dari metode tradisional (Bjola and Holmes 2015).

Penulis beranggapan bahwa konsep diplomasi publik merupakan konsep yang paling sesuai digunakan untuk menganalisis bagaimana diplomasi publik Taliban melalui media digital dalam upaya membangun citra positif setelah mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada 15 Agustus 2021. Setelah kembali berkuasa, Taliban terus berupaya mengumpulkan dukungan dan membentuk kepercayaan publik, tidak hanya masyarakat Afghanistan, tetapi juga komunitas internasional pada umumnya. Salah satu upaya yang mereka lakukan adalah

menjalankan diplomasi publik. Dalam melaksanakan diplomasi publiknya, Taliban memanfaatkan media digital untuk mempromosikan wajahnya yang lebih moderat kepada dunia. Melalui media digital, Taliban membangun “*public relations*” dengan menyebarkan pesan humanis dan religius. Mereka seolah-olah ingin menunjukkan kepada masyarakat Afghanistan dan komunitas internasional bahwa kelompok Taliban telah berubah menjadi lebih moderat dibandingkan rezim Taliban yang berkuasa pada tahun 1996-2001.

Taliban menyadari betapa pentingnya penggunaan media digital untuk mencapai tujuan diplomasi publik mereka. Media digital memudahkan pengiriman informasi ke negara-negara yang mana pemerintahnya memblokir pemberitaan mengenai Taliban di media tradisional. Oleh karena itu, Taliban terus berupaya mengoptimalkan penggunaan media digital untuk menyampaikan agenda politik mereka. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk membangun citra positif dan memperoleh dukungan dari dunia internasional setelah kembali menduduki tampuk kekuasaan.

Penelitian ini menggunakan tiga dimensi utama diplomasi publik dari Mark Leonard untuk mencoba menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan oleh penulis yaitu untuk melihat bagaimana upaya Taliban melakukan diplomasi publik melalui media digital sebagai upaya membangun citra positif dan membentuk kepercayaan publik setelah berhasil merebut kembali kekuasaan di Afghanistan.

1.7 Argumen Sementara

Penelitian ini menganalisis kegiatan diplomasi publik Taliban melalui media digital menggunakan tiga dimensi diplomasi publik menurut Mark

Leonard, yaitu; *News Management*, bagaimana Taliban memanfaatkan media digital dalam menyebarkan informasi dan memberikan respon atas pemberitaan negatif terhadap pemerintahan mereka. *Strategic Communication*, bagaimana Taliban melakukan kampanye politik melalui media digital untuk mempengaruhi persepsi masyarakat internasional. *Relationship Building*, dimensi ini menunjukkan bagaimana Taliban membangun hubungan jangka panjang dengan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, argumen sementara dalam penelitian ini adalah upaya Taliban untuk meningkatkan citranya melalui diplomasi publik dengan menggunakan media digital seperti website, Twitter, dan Youtube berlangsung dalam tiga dimensi diplomasi publik Mark Leonard.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering digunakan dalam dunia ilmu sosial dan humaniora, terutama yang berkaitan dengan pola dan tingkah laku manusia (*behavior*). Penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan untuk menjelaskan secara detail tentang orang, tindakan, dan peristiwa dalam kehidupan sosial. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif sehingga data yang terkumpul tidak menekankan pada angka tetapi berbentuk kata-kata atau gambar (Sugiyono 2013).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dapat berupa orang, tempat ataupun benda yang diamati dalam penelitian. Subjek yang diamati dalam penelitian ini adalah Taliban sebagai pemegang kekuasaan secara de facto di Afghanistan. Sedangkan objek penelitian adalah sesuatu yang akan diselidiki dari subjek penelitian, misalnya, sikap, kebijakan, respon dan lain sebagainya. Objek penelitian ini adalah diplomasi publik Taliban melalui media digital sebagai upaya membangun citra positif pasca pengambilalihan kekuasaan di Afghanistan pada tahun 2021-2022.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber data, melainkan dari pihak ketiga atau pengumpul data. Dengan kata lain, penelitian ini menggunakan data yang telah tersedia sebelumnya. Data ini kemudian diolah menjadi sebuah kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data sekunder melalui berbagai literatur seperti buku, jurnal, dokumen dan tulisan lain yang relevan dan dapat dijadikan acuan untuk mengungkap objek penelitian.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah dan menetapkan tujuan penelitian. Selanjutnya, penulis melakukan studi literatur untuk memastikan penelitian ini baru dan tidak sama dengan penelitian terdahulu. Setelah itu, penulis mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian

seperti buku, jurnal, dan artikel media massa. Penulis juga mengumpulkan berbagai publikasi yang menunjukkan bahwa Taliban sedang berupaya membangun *image* positifnya. Konten tersebut penulis kumpulkan melalui website resmi, Twitter, dan channel Youtube milik Taliban. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis, dan disajikan dalam bentuk narasi ke dalam bab ataupun sub-bab. Terakhir, penulis membuat kesimpulan atas data-data yang telah dikumpulkan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Secara sistematis, penelitian ini akan diuraikan menjadi empat bab utama:

Bab pertama menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, dan metodologi. Selanjutnya, pada bab dua akan dijelaskan mengenai sejarah lahirnya gerakan Taliban dan bagaimana peran media digital dalam perjuangan politik Taliban di Afghanistan. Kemudian, pada bab ketiga penulis akan mengaplikasikan konsep diplomasi publik terhadap studi kasus yang telah direncanakan sebelumnya. Penulis akan menganalisis strategi diplomasi publik Taliban melalui media digital menggunakan tiga dimensi diplomasi publik Mark Leonard. Terakhir, pada bab empat penulis akan menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran yang nantinya berguna untuk penelitian di masa yang akan datang.

BAB 2

MEDIA SOSIAL DAN POLITIK TALIBAN DI AFGHANISTAN

2.1 Pengambilalihan Kekuasaan di Afghanistan Tahun 2021

2.1.1 Sejarah Lahirnya Gerakan Taliban

Selama penjajahan Uni Soviet di Afghanistan, sebagian besar rakyat Afghanistan mengungsi di bagian Selatan dan Timur negeri itu. Seiring berjalannya waktu, muncul lembaga-lembaga pendidikan di tempat pengungsian yang dikelola oleh partai Islam Pakistan yang bernama Jamiat Ulama Islam. Selama masa invasi, madrasah menawarkan kekuatan sosial yang besar dalam membantu pemerintah melawan pendudukan asing. Pada masa ini juga ideologi perlawanan yang disebut sebagai jihad mulai bermunculan (Machmudi et al. 2021).

Peran madrasah di Afghanistan tidak hanya sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam saja, akan tetapi juga sebagai lembaga yang mampu melaksanakan fungsi sosial dan mempersatukan kelompok sosial dari berbagai etnis dan suku di Afghanistan. Terlebih lagi nilai-nilai Islam mampu diartikulasikan oleh madrasah di Afghanistan dalam perjuangan melawan pengaruh ideologi komunisme Uni Soviet di negara tersebut. Madrasah sebagai simbol perjuangan selalu mengambil peran penting dalam memperjuangkan hak rakyat. Hal ini yang kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi rakyat Afghanistan. Madrasah juga memiliki peran dalam munculnya gerakan Taliban, khususnya yang berada di wilayah Provinsi Kandahar hingga perbatasan selatan Afghanistan-Pakistan (Sahrasad et al., 2021).

Istilah “Taliban” berasal dari bahasa Pashtun yang berarti pencari ilmu atau murid yang dikhususkan kepada laki-laki. Dalam hal ini berarti Taliban merujuk pada murid yang belajar di Madrasah, lembaga pendidikan Islam di Afghanistan. Taliban merupakan sebuah kelompok yang bersifat sangat konservatif yang muncul pada dekade 1990-an (Drissel 2014). Taliban secara resmi didirikan pada pertengahan tahun 1994 di provinsi selatan Afghanistan, yakni Kandahar. Mereka memperoleh dukungan secara finansial dan militer dari Pakistan dan Arab Saudi. Gerakan ini terdiri dari para pelajar dari etnis Pashtun yang berasal dari berbagai madrasah seperti Zawiyah yang terletak di daerah perbatasan Afghanistan dan Pakistan di Peshawar, Balochistan dan lain sebagainya (Sahasrad et al. 2021).

Taliban muncul ketika Afghanistan sedang mengalami krisis, kekosongan ideologi, dan memulai reformasi. Kelompok ini kemudian melakukan reformasi dengan ideologi berdasarkan syari’at Islam, yaitu jihad (Machmudi et al. 2021). Para pengamat menyebutkan bahwa pandangan Taliban terhadap jihad terinspirasi dari aliran Sunni Deobandi yang berpusat di India yang diajarkan oleh Shah Waliullah (1703-1762) (Ashghor 2021). Kelompok ini dipimpin oleh Mullah Mohammad Omar yang merupakan seorang guru dari madrasah Sang-i Hisar di Provinsi Kandahar Utara (Machmudi et al. 2021).

Setelah penarikan Soviet dari Afghanistan di akhir 1980-an, negara kembali tercabik-cabik oleh perang saudara, kali ini pertikaian antara faksi-faksi politik Afghanistan. Perang saudara berkecamuk pada 1995, Taliban menyerang posisi pemerintah dekat Kabul dari markas mereka di Selatan. Penyerangan ini mendapat bantuan rahasia dari operasi intelijen Pakistan (Drissel 2014). Pada

penghujung 1996, kekuatan Taliban semakin besar setelah mendapat dukungan penuh dari masyarakat Afghanistan yang beretnis Pashtun dan kelompok-kelompok Islam konservatif yang berasal dari luar Afghanistan. Besarnya dukungan tersebut membawa Taliban menjadi penguasa sah pada 1996. Pemerintahan yang dibentuk Taliban dikenal dengan nama Imarah Islam Afghanistan (Anugerah and Purba 2021).

Di bawah kepemimpinan Taliban, Afghanistan tidak pernah menyelenggarakan pemilihan umum karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintahan Taliban pada periode 1996 hingga 2001 hanya diakui oleh Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Sebaliknya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak mengakui rezim Taliban karena dianggap banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan supremasi hukum (Anugerah and Purba 2021). Kala itu Taliban menerapkan hukum syariah yang sangat ketat, mereka melarang mendengarkan musik, menonton televisi, menggunakan internet, fotografi, dan berbagai hiburan lainnya (Bahar 2020). Tidak hanya itu, perempuan secara resmi dilarang mengenyam pendidikan dan menghadapi berbagai diskriminasi pekerjaan. Perempuan diharuskan mengenakan pakaian tradisional muslim pashtun yang menutupi seluruh tubuh. Sementara laki-laki harus menggunakan sorban dan memanjangkan janggut (Drissel 2014).

2.1.2 Kemenangan Taliban di Afghanistan Tahun 2021

Afghanistan telah dikenal sebagai “*the graveyard of empires*” selama lebih dari satu abad. Tentara asing yang memasuki pegunungan Afghanistan cenderung menghadapi perlawanan sengit dan sering kali kalah dalam pertempuran melawan pejuang suku. Kekuatan besar seperti Alexander Agung pada tahun 330 SM,

Kerajaan Inggris pada tahun 1840-an, hingga Uni Soviet pada tahun 1980-an, telah bertemu lawan mereka di Afghanistan dan kekalahan sebagai hasilnya (Drissel 2014).

Taliban berhasil merebut ibukota Afghanistan, Kabul, pada 15 Agustus 2021. Hal penting yang perlu dicatat adalah Taliban memasuki Kabul tanpa menghadapi perlawanan. Kembali berkuasanya Taliban di Afghanistan dianggap sebagai sebuah tragedi oleh beberapa negara. Penguasaan Kabul oleh Taliban memicu kepanikan di kota itu. Hal ini dapat disaksikan dari beberapa kanal media yang menampilkan foto yang menggambarkan ratusan warga Afghanistan berbondong-bondong berusaha meninggalkan negeri itu menggunakan pesawat militer Amerika Serikat. Mereka khawatir kembalinya Taliban di tampuk kekuasaan akan diwarnai kerusuhan yang berkepanjangan (Haryanto 2021).

Setelah 20 tahun berperang melawan invasi Amerika Serikat dan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO), kini muncul pertanyaan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Afghanistan sehingga Taliban dapat kembali berkuasa. Selama 20 tahun terakhir, ribuan generasi muda berhasil direkrut oleh Taliban untuk pergerakannya. Di sisi lain, Amerika Serikat sendiri telah menghabiskan anggaran lebih dari US\$ 2 triliun selama 20 tahun di Afganistan dan telah kehilangan ribuan tentara (CNBC Indonesia 2021). Sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk program pelatihan dan memperlengkapi pasukan keamanan Afghanistan. Namun saat ini, upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan NATO untuk membawa keamanan, perdamaian, dan stabilitas di Afghanistan nampak sia-sia, sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Soviet

sebelumnya (Beale 2021). Ada beberapa faktor pendukung kemenangan Taliban di Afghanistan diantaranya adalah sebagai berikut.

2.1.2.1 Perjanjian Damai 29 Februari

Perjanjian kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Taliban menjadi salah satu pintu masuk bagi kemenangan Taliban di Afghanistan. Perjanjian ini resmi ditandatangani pada 29 Februari 2020 di Doha, Qatar. Sebelum mencapai kesepakatan tersebut, Amerika Serikat dan Taliban telah memulai pembicaraan damai secara tentatif (Detiknews 2021). Perjanjian ini menandai berakhirnya invasi militer Amerika Serikat di Afghanistan yang telah berlangsung selama 18 tahun. Pihak Taliban diwakili oleh Mullah Abdul Ghani Baradar selaku kepala juru runding Taliban. Sementara itu, pihak Amerika Serikat diwakili oleh Zalmay Khalilzad yang merupakan perwakilan khusus Amerika Serikat untuk rekonsiliasi Afghanistan. Penandatanganan perjanjian bersejarah tersebut juga turut disaksikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo (Kompas.com 2020).

Sejak tahun 2018, Pemerintah Donald Trump telah membangun kontak-kontak dengan jaringan Taliban. Negara-negara yang berperan dalam membuka kontak dan memediasi proses pembicaraan damai tersebut diantaranya Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Pada 26 Januari 2019, tim juru runding Taliban dan Amerika Serikat bertemu kembali di Doha, Qatar. Pertemuan ini bertujuan untuk memfinalisasi poin yang akan dicantumkan dalam draf perjanjian damai untuk mengakhiri perang di Afghanistan (Tempo.co 2019). Sayangnya, upaya negosiasi di tahun 2019 menemui jalan buntu karena Donald Trump membatalkan pertemuan rahasia dengan pemimpin Taliban dan Presiden

Ashraf Ghani di Camp David (CNN Indonesia, 2019). Pembatalan ini merupakan wujud kekecewaan Amerika Serikat terhadap sikap Taliban yang tetap agresif melakukan penyerangan di tengah proses perundingan damai (CNN Indonesia, 2019).

Hal yang menarik dari perundingan damai ini adalah Amerika Serikat mau melakukan negosiasi tingkat tinggi dengan Taliban yang dilabelinya sebagai “teroris”. Selain itu, upaya-upaya negosiasi tersebut dilakukan dalam situasi okupasi Amerika Serikat tidak menghasilkan kemajuan yang berarti meskipun telah berlangsung selama dua dekade. Upaya Amerika Serikat dalam menanamkan pengaruhnya di Afghanistan secara substansial tidak menghasilkan kesadaran ideologis (demokrasi liberal) yang signifikan dan tidak mengakar. Di sisi lain, Taliban masih memiliki pengaruh yang cukup kuat di tengah masyarakat.

Perjanjian di Doha kala itu menghasilkan dokumen yang berjudul *“Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between the Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the United States as a state and is known as the Taliban and the United States of America”*. Terdapat empat poin perjanjian antara Taliban dan Amerika Serikat yang dimuat dalam dokumen tersebut diantaranya; (1) pihak Taliban harus memastikan bahwa Afghanistan tidak digunakan oleh kelompok atau individu manapun untuk mengancam kepentingan Amerika Serikat dan sekutu, (2) Amerika Serikat dan sekutu akan melakukan penarikan pasukan dari wilayah Afghanistan. Penarikan mundur ini dilakukan secara bertahap selama 14 bulan, (3) Pemerintah Afghanistan dan Taliban akan melakukan perundingan mengenai masa depan Afghanistan, dan (4) Pihak Taliban

dan Pemerintah Amerika Serikat akan melakukan gencatan senjata permanen (U.S Embassy in Qatar 2020).

Setelah mencapai kesepakatan dengan Taliban di Qatar tahun 2020, Washington mulai menarik pasukannya dengan imbalan jaminan keamanan dari Taliban dan komitmen untuk memulai pembicaraan dengan pemerintah Afghanistan. Meskipun kedua pihak telah terlibat dalam dialog, akan tetapi kekerasan di Afghanistan semakin meningkat (Asmara 2021). Beberapa pihak merasa ngeri dengan perundingan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Taliban. Ketakutan menjadi berlipat ganda setelah Presiden Joe Biden menegaskan bahwa ia akan memenuhi kesepakatan itu dan sebagai imbalannya Taliban berjanji tidak akan menjadikan Afghanistan sebagai wilayah operasi terorisme internasional (Simpson 2021). Kebijakan Joe Biden untuk menarik seluruh pasukan dari Afghanistan ini selaras dengan kebijakan pendahulunya, Donald Trump, meskipun mereka berasal dari partai politik yang berbeda (Anugerah and Purba 2021).

Dalam pidatonya pada 31 Agustus 2021, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa “perang di Afghanistan telah berakhir”. Pidato itu disampaikan oleh Biden di hadapan publik sehari setelah pasukan terakhir Amerika Serikat meninggalkan Kabul, yang menjadi pertanda berakhirnya perang selama 20 tahun. Biden mengatakan bahwa diakhirinya perang di Afghanistan merupakan bentuk pelaksanaan komitmennya terhadap rakyat Amerika. Menurut Biden, setiap harinya Amerika Serikat telah menghabiskan biaya US\$300 juta di Afghanistan sehingga sudah waktunya bagi Amerika Serikat untuk pergi (DW 2021). Meskipun menerima banyak kritik atas kebijakan penarikan pasukan

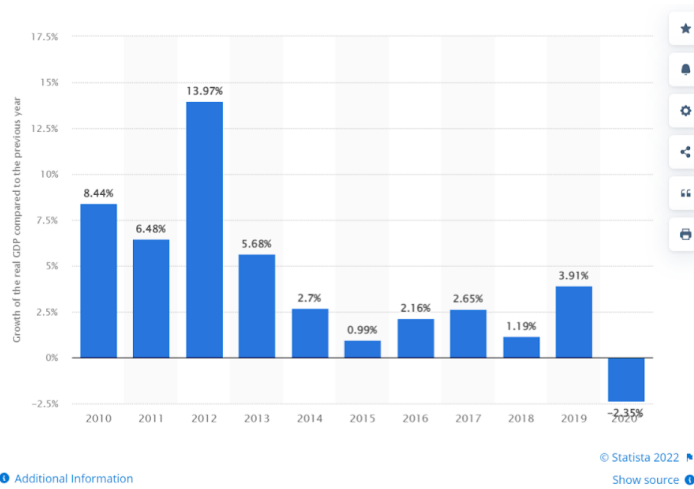
Amerika Serikat dari Afghanistan, namun Biden tetap dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak akan memperpanjang perang tanpa akhir tersebut. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, berkomitmen untuk menarik mundur seluruh pasukan paling lambat 11 September 2021. Biden menegaskan akan membebaskan rakyat Afghanistan untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa Amerika Serikat (CNBC Indonesia 2021).

2.1.2.2 Rapuhnya Pemerintahan di Afghanistan

Persoalan lain yang berkaitan dengan kemenangan Taliban adalah lemahnya dukungan masyarakat terhadap pemerintah Afghanistan. Hal ini menyebabkan keinginan rakyat Afghanistan untuk membela negara di bawah kepemimpinan rezim tidak kuat. Situasi ini menunjukkan bagaimana rezim yang selama ini berkuasa di Afghanistan sangat rapuh. Berkaitan dengan hal tersebut, letak permasalahannya dapat dilihat dari maraknya korupsi, kehidupan ekonomi yang lemah, dan kegagalan demokratisasi dalam menjawab persoalan politik Afghanistan yang kompleks.

Bukanlah hal yang mudah bagi Amerika Serikat dan dunia internasional untuk menstabilkan perekonomian dan membangun negara demokrasi setelah konflik berkepanjangan di Afghanistan. Berdasarkan laporan terbaru Kementerian Pertahanan AS, biaya perang di Afghanistan mencapai US\$815,7 miliar selama dua puluh tahun. Dana tersebut meliputi biaya operasi militer mulai dari makanan, bahan bakar, hingga hingga operasional kendaraan lapis baja Humvee, senjata dan amunisi, tank, hingga kapal induk dan serangan udara (CNN Indonesia 2021).

Diagram 2.1 Pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) di Afghanistan



Sumber: Statista (2022)

Meskipun pada tingkatan tertentu Amerika Serikat dan sekutu berhasil mengangkat taraf hidup rakyat Afghanistan, membangun infrastruktur, memajukan dunia pendidikan, dan membentuk media independen, akan tetapi pencapaian tersebut tidak disertai dengan perbaikan ekonomi domestik (Machmudi et al. 2021). Menurut laporan *World Bank*, selama ini ekonomi Afghanistan sangat bergantung pada bantuan negara donor. Dana bantuan sebesar US\$ 12,9 miliar telah dihimpun oleh *Afghanistan Reconstruction Trust Fund* yang dikelola oleh *World Bank*. Di sisi pemerintahan, *World Bank* mencatat hibah mendanai 75% belanja negara di Afghanistan. Konflik yang berlarut-larut membuat anggaran pertahanan menjadi sangat tinggi, sekitar 28% dari *Gross Domestic Product* (GDP), yang menyebabkan alokasi dana ke sektor lain menjadi minim (Setiaji 2021).

Ekonomi Afghanistan tumbuh tinggi karena melimpahnya bantuan dunia kepada negara ini. Pada 2003-2012, GDP Afghanistan rata-rata tumbuh 9,4% per tahun. Namun pada 2015-2020, ekonomi Afghanistan hanya tumbuh rata-rata

2,5% per tahun akibat dari mulai berkurangnya bantuan donor dari sekitar 100% terhadap GDP pada 2009 menjadi 42,9% pada 2020 (Setiaji 2021). Pada 2020, ketidakstabilan ekonomi mencapai puncaknya, GDP Afghanistan, menyusut hingga minus 2,35 persen turun 6,26% dari 2019 (Statista.com 2022).

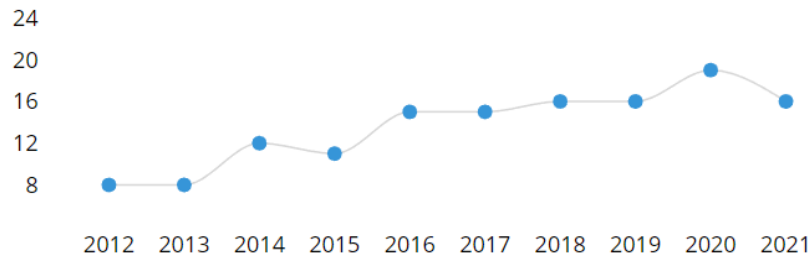
Masalah ekonomi di Afghanistan tidak terlepas dari tingginya tingkat korupsi di negara tersebut. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, akan tetapi hal itu akan sulit tercapai karena penyalahgunaan wewenang oleh para elit yang memegang kekuasaan. Situasi ini kemudian memicu kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Negara dengan tingkat korupsi yang tinggi memiliki sistem politik, lembaga ekonomi, dan administrasi yang lemah. Maraknya korupsi di Afghanistan menjadi bukti rendahnya kapasitas administrasi di negara tersebut. Dunia internasional, terutama Amerika Serikat dan negara-negara Barat, telah memberikan bantuan dana yang tidak sedikit untuk Afghanistan. Sayangnya, aliran dana tersebut tidak tersalurkan dengan baik karena adanya korupsi, hal ini menyebabkan proses demokratisasi pun sulit tercapai (Khuru'in 2017).

Dalam laporan ke Kongres Amerika Serikat pada Oktober 2020, *Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction* (SIGAR) memperkirakan antara Mei 2009 hingga 31 Desember 2019 sekitar US\$19 miliar telah lenyap (BBC News 2021). SIGAR mengecam Washington karena mengucurkan dana miliaran dolar ke Afghanistan dengan pengawasan yang sangat minim sehingga memicu budaya korupsi yang merajalela dan merusak misi Amerika Serikat (Katawazai 2016). Berdasarkan *Corruption Perception Index* oleh Transparency

tahun 2020, Afghanistan berada pada ranking 165 dari 180 negara di dunia, dengan jumlah skor 19/100 (Transparency 2020).

Grafik 2.1 Skor *Corruption Perception Index* Afghanistan

Score changes 2012 - 2021



Sumber: *Transparency International* (2020)

Korupsi juga telah melemahkan sistem peradilan. Di Afghanistan, peradilan sering kali tunduk pada keinginan pihak yang berkuasa dan yang memiliki koneksi politik. Sementara mereka yang tidak memiliki *privilege* tersebut harus membayar suap dan menderita frustrasi akibat proses peradilan yang panjang. Akibatnya, banyak masyarakat memanfaatkan sistem peradilan informal atau meminta bantuan kepada Taliban. Tindakan ini berimbas pada melemahnya legitimasi pemerintah Afghanistan (Azizi 2021).

Melemahnya peran negara semakin memudahkan Taliban menguasai sejumlah wilayah penting di utara, terutama Kabul. Di wilayah-wilayah penting tersebut, penegakan hukum dan HAM serta pembangunan ekonomi tidak mengalami pencapaian yang prestisius dan cenderung mengalami distorsi. Pembangunan infrastruktur dan dukungan dana yang diberikan oleh dunia internasional tidak dimanfaatkan secara signifikan untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Konflik yang tidak berkesudahan dan maraknya korupsi

berdampak pada hancurnya roda perekonomian di negara tersebut (Machmudi et al. 2021).

2.1.2.3 Kekalahan Militer Pemerintah Afghanistan

Secara hitung-hitungan di atas kertas, *the Afghan National Defense and Security Forces* (ANDSF) memiliki jumlah personel yang lebih banyak dan persenjataan yang lebih lengkap walaupun tanpa dukungan dari militer Amerika Serikat. Selama kurun waktu 2002-2006, sekitar 300.699 personel telah direkrut oleh koalisi Amerika Serikat dan pada tahun 2020 bertambah menjadi 307.000, jumlah tersebut termasuk tentara, polisi, dan angkatan udara. Sayangnya, pasukan militer ini hanya diberi peralatan tempur yang canggih tanpa didukung dengan latihan militer yang memadai (Machmudi et al. 2021).

Persoalan lain muncul tahun 2017 dan 2019 dimana terdapat laporan bahwa puluhan ribu tentara “hantu” telah dikeluarkan dari daftar. Ini berarti ada puluhan ribu tentara yang berkurang dan kemungkinan bergabung dengan milisi Taliban. Dalam laporan pada Desember 2020 dari *Report on Progress Toward Security and Stability in Afghanistan* disebutkan bahwa hanya ada 298.000 personel yang memenuhi syarat untuk dibayar. Hal ini menunjukkan ada ribuan tentara yang membelot. Selain itu, maraknya korupsi dan mismanajemen sumber daya menyebabkan kapabilitas pertempuran ANSDF menurun (Machmudi et al. 2021).

Di sisi lain, milisi Taliban bukanlah pasukan yang terlatih dengan konsep militer modern ataupun tentara dengan peralatan tempur yang canggih. Menurut Pusat Pemberantasan Terorisme AS di West Point, total kekuatan inti Taliban

diperkirakan berjumlah 60.000 personel. Dengan tambahan pendukung lainnya, jumlah mereka dapat melebihi 200.000 orang (Detiknews, 2021). Umumnya Taliban menghindari pertempuran skala besar selama tentara Afghanistan didukung oleh kekuatan udara Amerika Serikat. Mereka lebih memilih pusat-pusat terpencil dan terisolasi. Taliban menguasai banyak wilayah provinsi dengan bentuk pemerintahan bayangan yang memiliki pengadilan dan sistem pajaknya sendiri (Tempo.co 2021). Ketika berhasil menguasai Kabul pada 15 Agustus 2021, sebanyak seperempat dari 34 provinsi telah lebih dahulu dikuasai oleh pejuang Taliban. Selain itu, Taliban memiliki satu unit dengan nama Batalion Badri 313 dengan jumlah personel yang dirahasiakan oleh otoritas Taliban (Machmudi et al. 2021).

Untuk membiayai setiap operasi militernya, Taliban membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, meskipun tidak diketahui berapa jumlah pastinya. Taliban diprediksi menghasilkan US\$300 juta hingga US\$1,6 miliar per tahun. Berdasarkan laporan PBB pada Juni 2021 yang bersumber dari data intelijen negara anggota disebutkan bahwa Taliban memperoleh pasokan dana dari berbagai kegiatan kriminal seperti memproduksi dan memperdagangkan narkoba, pemerasan, dan penculikan. Selain itu, Taliban juga mendapatkan dana dari penguasaan sumber kekayaan alam Afghanistan berupa pertambangan dan donasi dari para pendukungnya. Donasi diperkirakan datang dari negara-negara tetangga yang mengakui Taliban (CNN Indonesia, 2021).

2.2 Taliban dan Propaganda Media Digital

2.2.1 Media Digital dalam Perjuangan Politik Taliban

Ketika berkuasa pada tahun 1996-2001, Taliban menolak keras penggunaan teknologi informasi dan media modern karena dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam, namun kini Taliban memanfaatkan internet dan media sosial sebagai bagian dari kampanye mereka untuk kembali berkuasa. Taliban telah mengandalkan teknologi atas nama propaganda dan hubungan masyarakat selama lebih dari satu dekade, akan tetapi pemanfaatan media sosial baru berakar beberapa tahun terakhir (Bodetti 2016).

Selama bertahun-tahun Taliban menggunakan internet dan media sosial dengan mahir. Kampanye media sosial ini menunjukkan bahwa Taliban telah berupaya memperkuat pesan mereka dengan membangun elemen-elemen media sosial. Pada saat yang sama, Taliban juga berusaha untuk melunakkan citra kerasnya, baik di dalam maupun di luar Afghanistan. Media sosial digunakan oleh Taliban untuk mempengaruhi masyarakat dunia dengan konten positif mereka. Kampanye di media sosial ini dilakukan oleh Taliban secara komprehensif. Cara ini dilakukan agar dunia mengetahui aktivitas positif mereka dan mendapatkan legitimasi kekuasaan di Afghanistan.

Pada tahun 2005, Taliban meluncurkan laman resmi dengan nama Al-Emarah, kini kontennya dipublikasi dalam lima bahasa yaitu Inggris, Arab, Pashtun, Dari, dan Urdu. Al-Emarah berarti “emirat” dalam bahasa Arab, mengacu pada negara berdaulat yang pernah mereka kuasai. Menurut saluran Telegram bahasa Inggris mereka, Al-Emarah adalah saluran resmi Imarah Islam Afghanistan yang menyediakan pembaruan berita, artikel, dan pernyataan resmi (Bodetti 2016).

Al-Emarah dapat diakses melalui <https://www.alemarahenglish.af/>. Semua konten yang dipublikasikan pada laman resmi ini berada di bawah pengawasan komisi kebudayaan Emirat Islam Afghanistan (IEA), yang dipimpin oleh Zabihullah Mujahid, juru bicara Taliban (Detiknews, 2021).

Pada tahun 2011, Taliban mulai menggunakan Twitter untuk menargetkan audiens Barat dan dengan cepat menggunakan platform tersebut untuk menyebarkan propaganda, menurut penelitian *Terrorism Research Initiative* pada 2014. Di Twitter tidak ada satupun akun Taliban yang terverifikasi, tetapi platform tersebut memungkinkan banyak akun yang tidak terverifikasi untuk mempromosikan kebijakan dan pernyataan Taliban (Dawi 2022). Pada 2019, Taliban belajar mengambil alih tagar, yang berarti memasukkan tagar populer dengan pesan mereka sendiri (Timberg and Lima 2021). Akun Twitter utama Taliban, @alemarahweb, diluncurkan pada Desember 2010, dan mulai membagikan tweet berbahasa Inggris setelahnya. Selain @alemarahweb, akun twitter lain yang terkait dengan Taliban diantaranya @alemarahenglish, @Zabehulah_M33, @suhailshaheen1, @QaharBalkhi, @ammarzamarak, @Ahmadmuttaqi01, @HafizZiaAhmad1, @HabibiSamangani, @leaOffice, dan masih banyak lagi.

Umpan Twitter @alemarahweb mulai diposting menggunakan Bahasa Inggris pada Mei 2011. Namun, satu-satunya tweet yang dapat diakses secara bebas adalah tweet yang di posting setelah November 2011. Sebagian besar tweet dari akun Taliban ini biasanya merinci metode penyerangan, jumlah korban jiwa yang ditimbulkan, peralatan yang dihancurkan, dan tempat peristiwa itu terjadi. Dalam pesan Idul Adha tahun 2011, Taliban juga menyebutkan juru bicara resmi,

situs web, dan *press release* Imarah Islam. Tweet yang diposting oleh akun Twitter Taliban biasanya menyertakan tautan ke komunike resmi, siaran pers, wawancara, puisi, video, dan blog bergaya esai yang diposting di situs web utama Taliban, termasuk Al-Emarah (Drissel 2014).

Setelah berhasil mengambil alih Kabul, muncul sejumlah cuitan tentang kemenangan Taliban dengan menyertakan beberapa tagar, seperti #نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ, #westandwithTaliban, #kabulregimecrimes (Atiq 2021). Lusinan akun baru pro-Taliban menjamur di Twitter, Facebook, dan Youtube. Akun-akun ini secara terbuka menyatakan bahwa mereka berafiliasi dengan Taliban. Mereka memposting gambar, video dan slogan untuk memperkuat jaminan bahwa Taliban telah membawa perdamaian di bumi Afghanistan dan menyampaikan pesan bahwa Taliban adalah penguasa sejati Afghanistan, berbeda dengan pemerintah sebelumnya yang korup (Ghaedi 2021). Taliban memiliki satu tim relawan di bawah pengawasan Mujahid yang secara khusus mempromosikan ideologi mereka secara daring. Kepala tim tersebut adalah Qari Saeed Khosty, direktur media sosial IEA. Khosty menerangkan kepada BBC bahwa timnya terdiri dari beberapa grup yang berfokus pada Twitter, Facebook, dan Whatsapp, untuk menyebarkan luaskan pesan dan menyiasati agar tagar Taliban menjadi tren (Kompas.com 2021).

Taliban terus mencari cara agar konten-konten mereka bisa membanjiri media sosial meskipun perusahaan teknologi seperti Youtube dan Facebook telah melarang konten-konten yang berkaitan dengan Taliban di platform mereka (Ikhsan 2021). Facebook telah melabeli Taliban sebagai “kelompok berbahaya” dan secara teratur menghapus akun dan laman yang berkaitan dengan kelompok

tersebut. Facebook menegaskan akan terus melarang konten Taliban di platformnya (Atiq 2021). Sedangkan Twitter tidak menutup akun Taliban, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki penilaian yang berbeda terhadap ketidakjelasan kebijakan dan hukum Amerika Serikat. Beberapa akun resmi Taliban telah diizinkan oleh Twitter untuk beroperasi, termasuk yang digunakan oleh juru bicara kelompok itu. Twitter mengizinkan akun-akun tersebut beroperasi selama mereka mematuhi aturan dengan tidak membagikan konten yang tidak pantas, seperti menghasut kekerasan melalui tweet. Oleh karena itu, Taliban lebih berfokus menyebarkan pesan mereka di Twitter (Timberg 2021).

Direktur eksekutif *SITE Intelligence Group*, Rita Katz, mengatakan Taliban saat ini sangat mahir menggunakan teknologi dan media sosial, tidak seperti 20 tahun yang lalu. Taliban dan pendukungnya memiliki sejumlah akun yang ditautkan di berbagai platform untuk mengantisipasi agar mesin pengirim pesan mereka tidak mudah dimusnahkan oleh perusahaan teknologi. Pada beberapa akun yang beredar di Facebook, Twitter, dan Instagram, serta dalam obrolan grup di Whatsapp dan Telegram, pesan pendukung Taliban biasanya berisi penolakan terhadap pandangan dominan Barat yang melihat Taliban sebagai sebuah kelompok yang tidak toleran, kejam, dan cenderung ingin balas dendam (Timberg and Lima 2021).

2.2.2 *Urgensi Diplomasi Publik Taliban melalui Media Digital*

Secara diplomatik, terdapat urgensi yang sangat perlu diupayakan oleh Taliban sesegera mungkin sebagai penguasa *de facto* di Afghanistan yaitu melakukan upaya diplomasi untuk meraih legitimasi dan dukungan internasional berupa pengakuan dari negara-negara di dunia (Zaki and Sujatmoko 2021).

Dukungan internasional sangat dibutuhkan dalam upaya rekonsiliasi dan pembangunan Afghanistan di masa mendatang. Itu sebabnya, Taliban harus mampu membuktikan kepada dunia bahwa mereka berbeda dengan yang dulu dan menjadi lebih inklusif dengan menjamin hak seluruh warga sipil tanpa terkecuali, termasuk kelompok minoritas.

Ketika berkuasa tahun 1996, Taliban dikenal sebagai kelompok radikal yang menerapkan hukum Islam secara ekstrim. Taliban yang melakukan berbagai aksi pelanggaran HAM memperoleh kecaman dari negara-negara di dunia. Belajar dari masa lalu, Taliban menyadari bahwa eksistensi kekuasaan mereka sangat ditentukan oleh penerimaan internasional. Oleh karena itu, Taliban perlu mengubah citra kelompok yang terkenal intoleran menjadi lebih moderat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Taliban yaitu menggencarkan diplomasi publik melalui media digital. Target utama diplomasi publik Taliban adalah masyarakat internasional, mengingat rezim Taliban memiliki citra buruk terutama bagi dunia Barat (Detik News 2021). Media digital menjadi alat yang penting untuk mentransfer informasi ke negara-negara yang dimana pemerintahnya memblokir pemberitaan terkait Taliban di media tradisional. Selain itu, media digital sangat membantu efisiensi kegiatan diplomasi publik Taliban, baik dalam segi waktu maupun biaya (Nye 2017).

BAB 3

ANALISIS DIPLOMASI PUBLIK TALIBAN MELALUI MEDIA DIGITAL PASCA PENGAMBILALIHAN KEKUASAAN

3.1 Media Digital Pemerintah Taliban

Pasca peristiwa 9/11, Afghanistan mengalami sebuah peningkatan dalam media massa. Stasiun televisi, radio, ratusan publikasi, industri film, dan infrastruktur internet telah bermunculan, dengan sumber pendanaan yang berasal dari luar dan dalam negeri, publik dan swasta (Osman 2014). Peran media semakin signifikan dengan perkembangan media baru berbasis internet. Afghanistan telah mengenal internet sejak 20 tahun yang lalu. *World Bank* memperkirakan saat ini sekitar 13,5% warga Afghanistan memiliki akses ke internet. Sebagian besar pengguna internet tinggal di pusat kota dengan infrastruktur yang sebagian besar dibangun dengan bantuan Amerika Serikat, *World Bank*, dan investasi perusahaan asing (Tangen 2021).

Gambar 3.1 Headline Penggunaan Seluler, Internet dan Media Sosial di Afghanistan



Sumber: Laporan Global Statshot 2021

Tumbuhnya akses terhadap telepon dan komunikasi disambut secara antusias oleh masyarakat Afghanistan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pengguna internet dan media sosial dari waktu ke waktu (VOA 2012). Pada Januari 2021, Afghanistan memiliki populasi 39,38 juta. Dari total populasi, ada sekitar 8,64 juta pengguna internet di Afghanistan pada Januari 2021. Jumlah pengguna internet di Afghanistan mengalami peningkatan sebesar 996 ribu (+13%) antara tahun 2020 dan 2021. Sementara itu, pengguna sosial media di Afghanistan berjumlah sekitar 4,40 juta dan meningkat 800 ribu (+22%) antara tahun 2020 dan 2021 (DataReportal 2021).

Taliban merupakan salah satu dari sekian banyak kelompok yang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dan menyampaikan pesan-pesan mereka. Bagi Taliban, media digital memiliki posisi penting dalam upaya mengkampanyekan isu-isu yang mereka perjuangkan. Dalam upaya menyebarkan gagasannya, Taliban menggunakan metode humas dan manajemen media untuk mengartikulasikan kepentingannya. Hadirnya infrastruktur internet di Afghanistan semakin memodernisasi kemampuan Taliban dalam berdiplomasi. Melalui media digital Taliban semakin mudah dalam menyebarkan gagasannya melalui publisitas dengan menggunakan berbagai platform yang tersedia (Junaedi 2010).

Pada 2005, Taliban meluncurkan laman resmi dengan nama Al-Emarah. Pada 2011, Taliban mulai menggunakan Twitter dan menggunakan layanan tersebut untuk menyebarkan propaganda (Dawi 2022). Berdasarkan laporan *Atlantic Council* tahun 2021, Taliban menjadikan media sosial sebagai senjata selama kampanye untuk mengambil alih Afghanistan. Pengamat melabeli kebangkitan kelompok militan itu sebagai “Taliban 2.0”. Strategi internet Taliban

dianggap sebagai bagian dari pendekatan yang lebih luas untuk mengubah citra kelompok tersebut di mata rakyat Afghanistan dan komunitas internasional (Tangen 2021). Salah satu anggota tim media sosial Taliban yang tidak ingin diungkap identitasnya mengungkapkan kepada BBC bahwa pimpinan rezim Taliban secara aktif berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris di Twitter, meskipun sebagian besar warga Afghanistan tidak mengerti bahasa Inggris. Alasan utamanya karena target audiens mereka bukanlah warga Afghanistan melainkan masyarakat Internasional. Langkah ini menjadi salah satu strategi Taliban dalam mencari legitimasi dan dukungan internasional (BBC 2021).

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari beberapa media digital Taliban diantaranya yakni situs Al-Emarah, situs kementerian luar negeri, channel Youtube kementerian luar negeri, akun Twitter @Alemarahenglish, @Zabehulah_M33, dan @QaharBalkhi. Media digital tersebut dipilih karena konten yang dipublikasikan dalam platform tersebut sebagian besar menggunakan bahasa Inggris, dimana hal ini akan mempermudah peneliti dalam mengklasifikasikan data. Berikut pemaparan mengenai media digital Taliban yang telah disebutkan sebelumnya.

3.1.1 Situs Pemerintah Taliban

Perkembangan teknologi telah dimanfaatkan Taliban untuk menjalankan diplomasinya. Situs web merupakan salah satu platform yang digunakan Taliban untuk menyampaikan pesan-pesan mereka kepada masyarakat Afghanistan dan komunitas internasional. Situs dengan nama Al-Emarah ini diluncurkan pada tahun 2005 dan berada di bawah pengawasan Komisi Kebudayaan Emirat Islam Afghanistan, yang dipimpin oleh Zabihullah Mujahid, juru bicara Taliban

(Detiknews 2021). Di dalamnya terdapat banyak informasi yang dikemas dalam berbagai konten yang dipublikasikan dalam lima bahasa yaitu Inggris, Arab, Urdu, Dari, dan Pashtun.

Gambar 3.2 Laman resmi Emirata Islam Afghanistan ‘Al-Emarah’



Sumber: <https://www.alemarahenglish.af/>

Disini pengunjung bisa mengakses informasi berupa berita, *weekly comment*, pernyataan, wawancara, artikel dan opini. Situs ini juga memungkinkan pembaca untuk membagikan postingan melalui Twitter, Facebook, dan layanan jejaring sosial lainnya.

Selain situs Al-Emarah, pemerintah Taliban juga memiliki situs Kementerian Luar Negeri/*Ministry of Foreign Affairs (MOFA) Islamic Emirate of Afghanistan*. Situs ini berisi informasi tentang aktivitas Kementerian Luar Negeri, terutama pertemuan menteri luar negeri dengan berbagai pihak dalam melakukan diskusi bilateral terkait hubungan antar negara. Terdapat pula informasi terkait kunjungan Menteri ke luar negeri dalam bentuk video. Informasi pada laman ini tersedia dalam dua bahasa yaitu bahasa Dari dan bahasa Inggris. Pada laman ini

juga terdapat tautan ke Facebook, Twitter, Youtube, dan Instagram Kementerian Luar Negeri Emirat Islam Afghanistan.

Gambar 3.3 Laman Kementerian Luar Negeri Emirat Islam Afghanistan

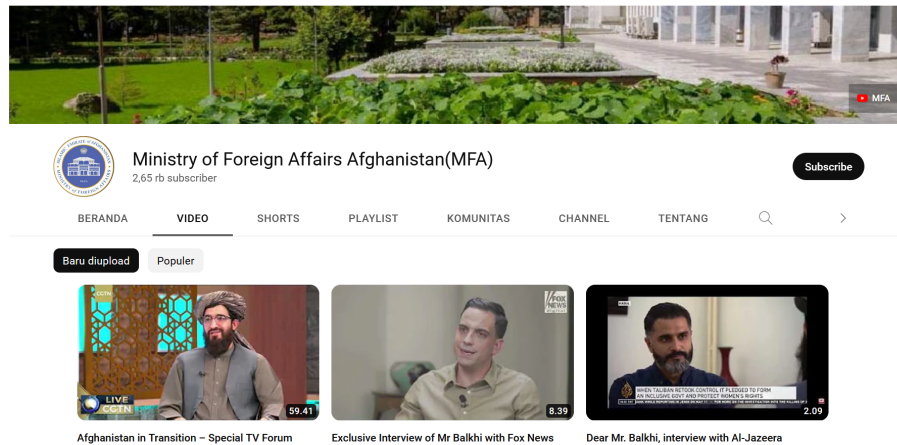


Sumber: <https://mfa.gov.af/en/home-2/>

3.1.2 Channel Youtube

Selain situs resmi, pemerintah Taliban juga membuat channel Youtubanya sendiri, <https://www.youtube.com/c/MinistryofForeignAffairsAfghanistanMFA/>, yang dibuat pada 2 November 2021. Channel tersebut berisi video wawancara, penyampaian pidato, kunjungan menteri luar negeri ke negara lain, serta beberapa pertemuan penting petinggi Taliban. Namun video yang menggunakan bahasa Inggris dalam channel ini hanya video wawancara yang dilakukan juru bicara Taliban dengan media asing. Di sisi lain, hanya ada beberapa video yang memiliki terjemahan. Kekurangan inilah yang menyebabkan publik asing kesulitan memahami pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui video-video yang telah diunggah dalam channel ini.

Gambar 3.4 Channel Youtube Kementerian Luar Negeri Afghanistan



Sumber: <https://www.youtube.com/c/MinistryofForeignAffairsAfghanistanMFA/>

3.1.3 Twitter

Media lain yang digunakan Taliban dalam diplomasi publik adalah Twitter. Akun-akun ini dibuat untuk melengkapi tujuan sekaligus alat diplomasi Taliban. Namun, tidak ada satupun akun Taliban yang terverifikasi di Twitter, Meskipun demikian, platform tersebut memungkinkan banyak akun yang tidak terverifikasi untuk mempromosikan kebijakan dan pernyataan Taliban (Dawi 2022).

Gambar 3.5 Laman Twitter @Alemarahenglish



Sumber: <https://twitter.com/Alemarahenglish>

Salah satu akun Twitter yang membagikan aktivitas Taliban adalah akun @Alemarahenglish yang dibuat pada Oktober 2010. Hingga 10 November 2022, akun tersebut telah diikuti oleh 10 ribu orang. Tweet yang dipublikasikan dalam akun @Alemarahenglish menggunakan bahasa Inggris. Secara umum unggahan dalam akun ini berisi prestasi-prestasi yang telah dilakukan pemerintahan Taliban. Selain itu, ia juga Aktif me-retweet postingan dari akun Twitter juru bicara Taliban.

Diagram 3.1 Tweet berdasarkan jenis akun @Alemarahenglish

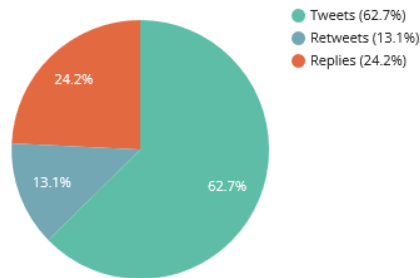
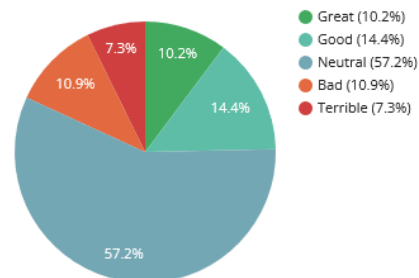


Diagram 3.2 Tweet berdasarkan sentimen akun @Alemarahenglish



Sumber: Social Bearing (2022)

Analisis sentimen pada tweet akun @Alemarahenglish akan menjadi sangat penting dengan ekstraksi data sehingga dalam penelitian ini dilakukan ekstraksi data menggunakan Social Bearing. Data dikumpulkan dari 1 Juni 2021 hingga 19 Maret 2022. Hasil pada gambar 3.5 menunjukkan bahwa akun tersebut lebih banyak membagikan unggahan berupa *tweets* (62,7%) dibandingkan melakukan *retweet* (13,1%) atau *replies* (24,2%). Sementara gambar 3.6 menunjukkan bahwa postingan di akun ini memperoleh sentimen netral (57,2%) dengan persentase yang lebih besar dibandingkan dengan jenis sentimen lainnya. Selain akun resmi media sosial Al-Emarah, terdapat juga akun media sosial milik juru bicara Taliban. Akun-akun tersebut juga digunakan untuk menyampaikan

pernyataan-pernyataan terkait isu tertentu atau kasus internasional terkini, serta mempromosikan kebijakan luar negeri Emirat Islam Afghanistan terhadap publik internasional.

Gambar 3.6 Laman Twitter @Zabehulah_M33



Sumber: https://twitter.com/Zabehulah_M33

Akun pertama adalah akun Twitter milik juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, yang dibuat sejak April 2017 dan telah memiliki 756,1 ribu pengikut. Akun pribadi ini cukup aktif mengunggah konten yang berkaitan dengan aktivitas pemerintahan dan memberikan respon atas isu atau peristiwa tertentu. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui Social Bearing dari bulan Juli 2021 hingga 19 Maret 2022, akun Twitter @Zabehulah_M33 lebih banyak membagikan unggahan berupa *tweets* (64,5%) dibandingkan *retweet* (24,1%) atau *replies* (11,4%). Selain itu, unggahan di akun ini memperoleh sentimen netral dengan persentase yang lebih besar dibandingkan dengan jenis sentimen lainnya.

Diagram 3.3 Tweet berdasarkan jenis akun @Zabehulah_M33

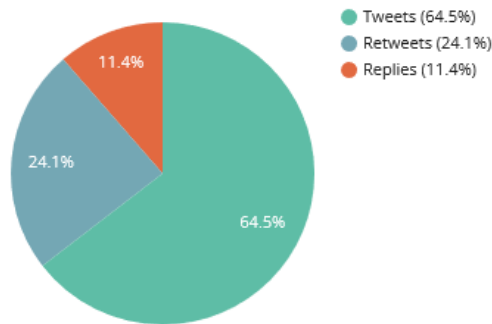
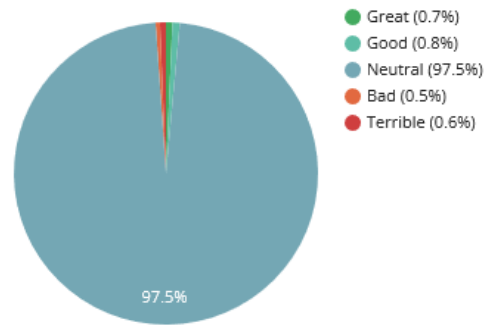


Diagram 3.4 Tweet berdasarkan sentimen akun Zabehulah_M33



Sumber: Social Bearing (2022)

Akun selanjutnya adalah akun Twitter milik juru bicara kementerian luar negeri, @QaharBalkhi yang dibuat pada Agustus 2021 dan hingga Oktober 2022 telah memiliki 177,6 ribu pengikut. Sama halnya dengan akun milik Zabihullah Mujahid, @QaharBalkhi juga sangat aktif mengunggah kebijakan luar negeri Imarah Islam Afghanistan dan memberikan respon atas pemberitaan atau isu tertentu yang berkaitan dengan pemerintahan Taliban.

Gambar 3.7 Laman Twitter @QaharBalkhi



Sumber: <https://twitter.com/QaharBalkhi>

Berdasarkan ekstraksi data yang dilakukan melalui Social Bearing pada

September 2021 hingga September 2022, menunjukkan bahwa akun @QaharBalkhi lebih banyak melakukan *replies* (47,2%) dibandingkan dengan *tweets* (31,7%) dan *retweet* (21,2%). Unggahan pada akun tersebut juga memperoleh sentimen netral dengan persentase yang lebih besar dibandingkan dengan dengan jenis sentimen lainnya.

Diagram 3.5 Tweet berdasarkan jenis akun @QaharBalkhi

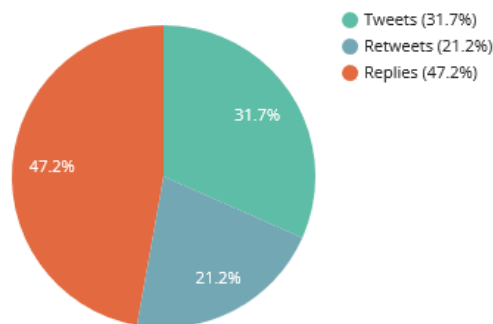
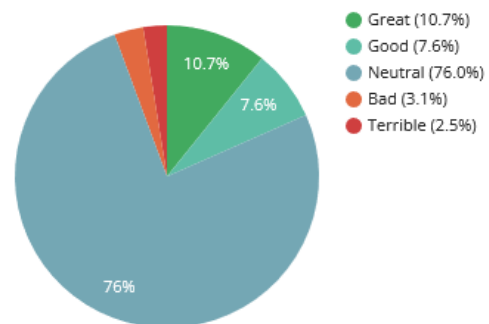


Diagram 3.6 Tweet berdasarkan sentimen akun @QaharBalkhi



Sumber: Social Bearing (2022)

3.2 Analisis Implementasi Tiga Dimensi Diplomasi Publik Mark Leonard

3.2.1 News Management

News Management adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaku diplomasi publik dalam melakukan pemberitaan atau memberikan respon terhadap isu atau berita secara cepat dan lebih luas melalui media. Manajemen berita menjadi hal yang sangat krusial dalam menjalankan diplomasi melalui media. Manajemen berita dapat dilakukan secara online maupun offline tergantung kepentingan nasional (Leonard 2002).

Taliban secara aktif memberikan respon melalui media digital karena banyaknya isu kontroversial di Afghanistan yang menjadi sorotan dunia internasional. Di antara isu kontroversial yang masih sering diperbincangkan

hingga saat ini adalah hak perempuan dan kelompok minoritas. Selama setahun terakhir, banyak larangan di tingkat lokal yang diberlakukan secara bertahap. Sebagian besar aturan-aturan itu membatasi hak perempuan Afghanistan, mulai dari larangan bepergian sendirian, membatasi hak bekerja dan bersekolah, hingga aturan berpakaian (BBC 2022). Inilah yang memicu aksi-aksi demo yang penuh kecaman terhadap pemerintahan Taliban (CNN Indonesia 2021). Berikut adalah beberapa isu yang menjadi sorotan dunia internasional sejak Taliban kembali berkuasa di Afghanistan.

3.2.1.1 Hak Asasi Manusia

Pada 12 September 2022, Dewan Hak Asasi Manusia PBB merilis laporan pertama tentang keadaan di Afghanistan sejak Taliban mengambil alih negara itu pada 2021. Richard Bennett, pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Afghanistan, mengatakan bahwa Afghanistan mengalami krisis hak asasi manusia yang semakin mendalam di bawah rezim Taliban (VOA 2022). Namun Taliban menolak laporan itu, dan ditanggapi oleh Zabihullah Mujahid, juru bicara Taliban, melalui cuitan Twiternya pada 13 September 2022.

Menurut Mujahid, saat ini tidak ada ancaman bagi kehidupan di Afghanistan. 181 universitas negeri maupun swasta telah dibuka baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ribuan perempuan Afghanistan dapat bekerja di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, media, bank, dan lain-lain. Selain itu, hak-hak minoritas juga dilindungi, tidak ada yang dibunuh, ditangkap, dituntut, atau dicegah untuk beribadah. Di sisi lain, ratusan serangan yang ditujukan pada tempat ibadah kaum minoritas berhasil dicegah. Dalam

beberapa kasus, para pelaku telah ditahan dan dihukum berat. Menurut Mujahid hal-hal tersebut tidak disorot dalam laporan PBB. Mujahid menganggap laporan yang diajukan oleh Bannett tidak bertanggung jawab. Ia juga menekankan bahwa PBB seharusnya menghormati pendapat dan kepercayaan orang-orang dari seluruh dunia dan tidak melihat isu-isu internasional hanya melalui kacamata negara tertentu karena tindakan tersebut dapat merusak reputasi PBB sebagai organisasi internasional.

Gambar 3.8 Respon Zabihullah Mujahid atas Laporan Dewan HAM PBB



Sumber: https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1569396819938910208

Tidak hanya itu, Kementerian Luar Negeri juga merilis sebuah pernyataan pada 28 Oktober 2022 melalui laman resminya. Dalam pernyataan tersebut Kementerian Luar Negeri Imarah Islam Afghanistan menganggap laporan tentang

situasi HAM di Afghanistan yang disampaikan oleh Pelapor Khusus Richard Bennett pada sidang UNGA ke-77 bertentangan dengan kenyataan. Pernyataan itu dinilai tidak bertanggung jawab dan seperti ditujukan untuk menyebarkan kebohongan dan perpecahan di tengah masyarakat Afghanistan. Padahal selama kunjungannya di Afghanistan, pejabat Imarah Islam memberi Bannet laporan yang dapat diverifikasi yang menunjukkan adanya perbaikan dalam situasi hak asasi manusia di negara tersebut, namun hal itu diabaikan dalam pernyataannya. Tindakan yang tidak profesional ini dianggap menodai nama pemerintahan Imarah Islam Afghanistan dan membahayakan semangat kerjasama (MoFA Afghanistan 2022).

Terkait dengan hak-hak perempuan di Afghanistan, Zabihullah Mujahid menyatakan bahwa Imarah Islam berkomitmen penuh untuk menegakkan, membela, dan melindungi semua hak syariah perempuan Afghanistan. Pernyataan ini disampaikan melalui akun Twitter pribadinya pada 8 Maret 2022 yang diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional atau *International Women's Day* (IWD).

Gambar 3.9 Unggahan @Zabehulah_M33 mengenai Hak Perempuan



Selain itu, situs Al Emarah mempublikasikan sebuah artikel pada 26 Oktober yang berjudul *IEA is Not Against Girls Education*. Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi bahwa Imarah Islam Afghanistan tidak menentang pendidikan anak perempuan sebagaimana yang diberitakan oleh negara-negara Barat dan sekutunya. Sejak berkuasa tahun 2021, pihak berwenang berupaya untuk menetapkan prinsip, kurikulum, dan situs pendidikan berdasarkan syariat Islam bagi anak perempuan. Namun membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang diharapkan untuk mencapai tujuan tersebut karena sistem dimulai dari nol setelah pemerintahan rezim korup (al Emarah 2022).

Taliban juga mencoba menepis tuduhan media Barat yang menyatakan bahwa Taliban menindas hak-hak minoritas. Pada 3 November 2022, situs Al Emarah menerbitkan sebuah artikel yang berjudul *Deputy PM Meets Shiite Scholars, Eders*. Artikel tersebut menjelaskan mengenai pertemuan yang dilakukan oleh Mawlawi Abdul Salam Hanafi, Wakil Perdana Menteri Administrasi Imarah Islam Afghanistan, dengan sejumlah ulama dan tetua Syiah. Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi bahwa setelah berakhirnya pendudukan asing dan pendirian kembali, Imarah Islam Afghanistan telah memperlakukan semua rakyat Afghanistan, terutama orang-orang Syiah, dengan cara yang baik. Orang-orang Syiah sepenuhnya puas dan terus memberikan dukungan kepada pemerintah (al Emarah 2022).

Juru bicara Taliban juga menegaskan bahwa Afghanistan adalah rumah bersama semua warga Afghanistan dan tidak ada ancaman yang ditujukan kepada warga Afghanistan manapun terlepas dari etnis, agama, atau wilayah mereka. Imarah Islam menjamin keamanan setiap warga negara. Semua masyarakat Sunni,

Syiah, Sikh, dan Hindu dapat menjalankan agama mereka dengan bebas. Hal tersebut disampaikan melalui akun Twitter Abdul Qahar Balkhi dan Zabihullah Mujahid.

Gambar 3.10 Unggahan @QaharBalkhi terkait HAM



Gambar 3.11 Unggahan @Zabehulah_M33 terkait HAM



3.2.1.2 Kebebasan Pers

Setelah Taliban kembali berkuasa, lanskap media Afghanistan telah berubah secara radikal. Salah satu penyebab utama perubahan lanskap media adalah krisis ekonomi dan pembatasan tertentu yang diberlakukan oleh rezim Taliban. Media harus mematuhi “11 Aturan Jurnalisme” versi Taliban yang dirilis oleh Kementerian Informasi dan Kebudayaan. “Aturan Jurnalisme” ini memungkinkan penyensoran, persekusi, dan perampasan kemerdekaan jurnalis (VOA 2021).

Berdasarkan hasil survei *Reporters Without Borders* (RSF), sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada 15 Agustus 2021, Afghanistan telah kehilangan 39,59% outlet medianya dan 59,86% jurnalisnya, khususnya jurnalis perempuan. Sebelum 15 Agustus 2021, Afghanistan memiliki 547 outlet media. Satu tahun kemudian, 219 menghentikan aktivitasnya (RSF 2021). Taliban memerintahkan

media lokal untuk tidak menyiarkan program musik atau hiburan apapun, termasuk sinetron asing. Selain itu, stasiun-stasiun televisi swasta di Afghanistan dilarang menayangkan program berita *Deutsche Welle* (DW), *Voice of America* (VOA) dan *British Broadcasting Corporation* (BBC). Menurut Enamullah Samangani, juru bicara Taliban, pelarangan itu dikarenakan media asing tidak mematuhi hukum Taliban (Noorzai 2022).

Dalam menghadapi lanskap media yang diambang kehancuran, para pejabat Taliban berusaha memberi tahu komunitas internasional bahwa mereka mendukung kebebasan pers dan tidak ada ancaman bagi jurnalis (Tangen 2022). Deputi bidang publikasi di Kementerian Informasi dan Kebudayaan, Hayatullah Muhajir Farahi, menolak klaim *Media Freedom Coalition* (MFC) yang menyatakan bahwa aktivitas media telah dibatasi di Afghanistan. Ia mengatakan bahwa semua media beroperasi dengan normal sesuai dengan budaya dan nilai-nilai Islam di negara tersebut. Merujuk ke beberapa klaim yang dibuat oleh media asing yang menyebutkan bahwa Imarah Islam Afghanistan telah memberlakukan pembatasan pada media, Hayatullah Muhajir Farahi menegaskan bahwa klaim pembatasan pada media tidak berdasar dan tidak benar (Daud 2022).

Pada 19 Mei 2022, situs Al Emarah mempublikasikan sebuah artikel yang berjudul *Media violation commission formed on press freedom day*. Dalam artikel tersebut Zabihullah Mujahid mengatakan bahwa kembali diaktifkannya komisi pelanggaran media merupakan perwujudan komitmen Taliban untuk mendukung media dan mengatasi masalah mereka. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Taliban itu melalui sebuah konferensi pers yang diselenggarakan di Kabul dalam rangka menghormati hari kebebasan pers. Sebelumnya, Taliban telah

berjanji untuk menghormati kebebasan pers dan menghidupkan kembali komisi pelanggaran media untuk bertindak sebagai platform bagi jurnalis serangan dan pemenjaraan terhadap mereka (Noorzai 2022).

Berdasarkan pernyataan deputi bidang publikasi di Kementerian Informasi dan Kebudayaan, Hayatullah Muhajir Farahi, saat ini lebih dari 300 media domestik dan 14 media asing yang beroperasi di Afghanistan. Selain itu, lebih dari 700 jurnalis termasuk 200 jurnalis internasional aktif dan terlibat dalam pembuatan laporan di Afghanistan (Daud 2022). Dalam pertemuan dengan Fiona Frazer, kepala hak asasi manusia *United Nations Assistance Mission for Afghanistan* (UNAMA), Farahi menekankan media nasional dan internasional harus memberitakan fakta dan realitas di Afghanistan. Ia menganggap beberapa media dan komunitas internasional memperburuk situasi di Afghanistan dengan menerbitkan laporan yang jauh dari kebenaran (The Kabul Times 2022).

Selanjutnya, dalam pernyataan yang disampaikan Mujahid dan Balkhi melalui akun Twitter mereka, disampaikan bahwa Imarah Islam Afghanistan berkomitmen untuk menjamin perlindungan dan mendukung seluruh aktivitas media di negara tersebut. Mujahid mengatakan bahwa mereka tidak menutup outlet media manapun sejak berkuasa. Selain itu, tidak ada satupun jurnalis yang kehilangan nyawa dan tidak ada media yang menghadapi masalah keamanan. Sebagian dari outlet media terpaksa tutup karena kekurangan dana dari negara donor. Pemerintah berupaya untuk membantu mereka menyelesaikan masalah finansial tersebut. Sementara, Balkhi menginformasikan bahwa hingga November 2022, lebih dari 270 outlet media domestik dan 14 media internasional beroperasi di Afghanistan. Sejak Maret 2022, Imarah Islam Afghanistan telah memberikan

izin kepada lebih dari 700 jurnalis dari 196 jaringan media yang berasal dari Asia, Eropa, Amerika, dan Oseania.

Gambar 3.12 Respon Zabihullah Mujahid Perihal Aktivitas Media



Sumber: https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1521479145699659777

Gambar 3.13 Respon Abdul Qahar Balkhi Perihal Aktivitas Media



Sumber: <https://twitter.com/QaharBalkhi/status/1587869554847498248>

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Taliban berhasil mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada 15 Agustus 2021 setelah 20 tahun berperang melawan invasi Amerika Serikat dan sekutunya. Namun, persepsi publik internasional terhadap Taliban yang masih relatif negatif membuat pemerintahan baru ini memberikan perhatian khusus dengan menggencarkan diplomasi publik. Untuk mencapai tujuan diplomasi publiknya, Taliban mengoptimalkan penggunaan media digital untuk memperbaiki citranya dan legitimasi internasional. Beberapa media digital yang dimanfaatkan Taliban untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya yaitu website, Twitter, dan Youtube. Kelompok ini secara aktif menanggapi berbagai pemberitaan negatif yang tersebar terkait pemerintahan Taliban di Afghanistan.

Setelah dianalisis menggunakan tiga dimensi diplomasi publik Mark Leonard, ditemukan bahwa pelaksanaan diplomasi publik Taliban melalui berbagai platform media digital hanya berlangsung dalam dimensi *news management* saja dan belum mencapai dimensi *strategic communication* dan *relationship building*. Sampai akhir tahun 2022, penulis melihat media digital Taliban lebih banyak berfokus pada bagaimana kelompok tersebut melakukan memberikan respon atas pemberitaan negatif terhadap rezim mereka. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang mereka sebarakan melalui media digital tidak terprogram, namun menyesuaikan dengan isu tertentu yang tengah menjadi sorotan masyarakat internasional.

Dilihat dari dimensi *news management*, Taliban memanfaatkan media digitalnya berupa website, Twitter, dan Youtube untuk memberikan respon atas isu atau pemberitaan negatif yang berasal dari media asing maupun kelompok anti-Taliban. Melalui berbagai platform media digitalnya, Taliban berusaha menampilkan bahwa pemerintahan mereka saat ini jauh lebih moderat dan mereka tidak anti HAM. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Taliban terus mengoptimalkan penggunaan media digital untuk meningkatkan kegiatan diplomasi publik mereka. Hal ini merupakan salah satu strategi Taliban dalam mencari legitimasi internasional. Namun, penulis menemukan kekurangan dalam media digital Taliban yaitu media digital yang seharusnya menjadi platform komunikasi dua arah hanya menjadi alat komunikasi satu arah. Hal ini menyebabkan diplomasi publik Taliban melalui media digital tidak memiliki pengaruh yang begitu berarti dalam mempengaruhi persepsi publik dan meningkatkan citra positifnya.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini terbatas pada bagaimana upaya Taliban melakukan diplomasi publik melalui media digital di tahun 2021-2022. Oleh karena itu, untuk peneliti yang akan melakukan riset dengan topik yang sama, penulis merekomendasikan untuk melihat bagaimana dampak diplomasi publik Taliban melalui media digital terhadap citra mereka setelah kembali berkuasa di Afghanistan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Saida. 2022. "Thousands of Tourists Visit Kunar, since IEA Return." *The Kabul Times*. June 6, 2022.
- Ahmadzai, Atal, and Faten Ghosn. 2022. "Taliban 2.0 Aren't so Different from the First Regime, after All." *The Conversation*, January 18, 2022. <https://theconversation.com/taliban-2-0-arent-so-different-from-the-first-regime-after-all-173394>.
- Anjum, Samaya. 2022. "Taliban-Ruled Afghanistan Takes New Steps Toward Regional Integration." *The Diplomat*. August 6, 2022. <https://thediplomat.com/2022/08/taliban-ruled-afghanistan-takes-new-steps-toward-regional-integration/>.
- Anugerah, Boy, and Jabinson Purba. 2021. "Afghanistan's Political and Security Conditions under Taliban's Regime and Its Significances to Global Geopolitics." *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 9 (1).
- Ashghor, Aly. 2021. "Taliban Di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan Dan Aliansinya Dengan ISIS (Taliban in Afghanistan: Overview of Its Ideology, Movement and Alliance with ISIS)." *Jurnal Keamanan Nasional* VII (1).
- Asmara, Chandra. 2021. "Begini Kebijakan Presiden Baru AS Joe Biden Soal Taliban." *CNBC Indonesia*. January 23, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210123171649-4-218265/begini-kebijakan-presiden-baru-as-joe-biden-soal-taliban>.
- Aswar, Hasbi. 2021. "Mengapa Taliban Menang Melawan AS?" *Al-Wa'ie*, 2021.
- Atiq, Sarah. 2021. "Taliban: Dulu Melarang Internet Dan Hancurkan Pesawat Televisi Dan Kamera, Sekarang Sangat Aktif Manfaatkan Media Sosial." *BBC News*. September 7, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58471604>.
- Azizi, Wahidullah. 2021a. "How Corruption Played a Role in the Demise of the Afghan Government." *The Diplomat*. October 13, 2021. <https://thediplomat.com/2021/10/how-corruption-played-a-role-in-the-demise-of-the-afghan-government/>.
- . 2021b. "How Corruption Played a Role in the Demise of the Afghan Government." *The Diplomat*. October 13, 2021. <https://thediplomat.com/2021/10/how-corruption-played-a-role-in-the-demise-of-the-afghan-government/>.
- Bahar, Hazrat M. 2020. "Social Media and Disinformation in War Propaganda: How Afghan Government and the Taliban Use Twitter." *Media Asia* 47 (1–2): 34–46. <https://doi.org/10.1080/01296612.2020.1822634>.
- Bainus, Arry, and Junita Budi Rachman. 2018. "Editorial: Kepentingan Nasional Dalam Hubungan Internasional." *Intermestic: Journal of International Studies* 2 (2): 109. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.1>.

- BBC. 2022. "Setahun Kekuasaan Taliban, Bagaimana Hak-Hak Perempuan Afghanistan Direnggut?" BBC News Indonesia. August 13, 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-62515659>.
- BBC News. 2021. "Afghanistan: Berapa Biaya Yang Sudah Dihilangkan Amerika Serikat Dan Sekutu-Sekutunya Dalam Perang Melawan Taliban?" August 17, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58241990>.
- Beale, Jonathan. 2021. "Taliban: Bagaimana Kelompok Ini Bisa Merebut Wilayah-Wilayah Di Afghanistan Begitu Cepat?" BBC News. August 13, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58143494>.
- Bernatis, Vincent. 2014. "The Taliban and Twitter: Tactical Reporting and Strategic Messaging." *Perspectives on Terrorism* 8 (6): 25–35. <https://about.jstor.org/terms>.
- Bjola, Corneliu, and Marcus Holmes. 2015. *Digital Diplomacy Theory and Practice*. Routledge.
- Bodetti, Austin. 2016. "The Taliban's Latest Battlefield: Social Media – The Diplomat." *The Diplomat*. September 8, 2016. <https://thediplomat.com/2016/09/the-talibans-latest-battlefield-social-media/>.
- CNBC Indonesia. 2021a. "Taliban Menang Di Afghanistan, Kabul Resmi Dikuasai." CNBC Indonesia. August 16, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210816063206-4-268604/taliban-menang-di-afghanistan-kabul-resmi-dikuasai>.
- . 2021b. "Taliban Menang Di Afghanistan, Kabul Resmi Dikuasai." CNBC Indonesia. August 16, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210816063206-4-268604/taliban-menang-di-afghanistan-kabul-resmi-dikuasai>.
- CNN Indonesia. 2019a. "Trump Batalkan Pertemuan Rahasia Dengan Pemimpin Taliban." CNN Indonesia. September 8, 2019. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190908085733-134-428483/trump-batalkan-pertemuan-rahasia-dengan-pemimpin-taliban>.
- . 2019b. "Negosiasi Damai Buntu, AS Sebut Bakal Gencar Serang Taliban." CNN Indonesia. September 10, 2019. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190910111713-113-429018/negosiasi-damai-buntu-as-sebut-bakal-gencar-serang-taliban>.
- . 2021a. "Mengintip Kekuatan Militer Dan Sumber Dana Taliban." August 20, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210818155019-120-681980/mengintip-kekuatan-militer-dan-sumber-dana-taliban>.
- . 2021b. "Menghitung Kerugian AS Buru Dalang Teror 9/11 Di Afghanistan." September 11, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210909142819-134-692032/menghitung-kerugian-as-buru-dalang-teror-9-11-di-afghanistan>.
- . 2021c. "Perempuan Afghanistan Demo Larangan Perjalanan Taliban." CNN Indonesia. December 28, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211228204123-113-739804/perempuan-afghanistan-demo-larangan-perjalanan-taliban>.

- DataReportal. 2021. "Digital in Afghanistan." <https://datareportal.com/reports/digital-2021-afghanistan>.
- Daud, Mohammad. 2022. "Media Operating Normally under Islamic Values, Afghan Culture." *The Kabul Times*. November 27, 2022.
- Dawi, Akmal. 2022. "Are the Taliban Losing Their Digital Clout?" VOA. July 28, 2022. <https://www.voanews.com/a/are-taliban-losing-their-digital-clout/6676585.html>.
- Detik News. 2021a. "Bagaimana Taliban Bisa Merebut Kota-Kota Afghanistan Begitu Cepat?" August 13, 2021. <https://news.detik.com/bbc-world/d-5681329/bagaimana-taliban-bisa-merebut-kota-kota-afghanistan-begitu-cepat>.
- . 2021b. "Taliban Kembali Berkuasa, Bagaimana Nasib Afghanistan Ke Depan?" Detik News. September 3, 2021. <https://news.detik.com/bbc-world/d-5708142/taliban-kembali-berkuasa-bagaimana-nasib-afghanistan-ke-depan>.
- . 2021c. "Taliban Dulu Larang Internet, Kini Aktif Manfaatkan Media Sosial." September 8, 2021. <https://news.detik.com/bbc-world/d-5714403/taliban-dulu-larang-internet-kini-aktif-manfaatkan-media-sosial>.
- Drissel, David. 2014. "Reframing the Taliban Insurgency in Afghanistan: New Communication and Mobilization Strategies for the Twitter Generation." *Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression* 7 (2): 97–128. <https://doi.org/10.1080/19434472.2014.986496>.
- DW. 2021. "Presiden AS Joe Biden Nyatakan Perang Afganistan 'Berakhir.'" DW. September 1, 2021. <https://www.dw.com/id/joe-biden-nyatakan-perang-afganistan-berakhir/a-59046660>.
- Emarah, al. 2022. "IEA Is Not Against Girls Education." Al Emarah. October 26, 2022. <https://www.alemarahenglish.af/iea-is-not-against-girls-education/>.
- . 2022b. "Deputy PM Meets Shiite Scholars, Eders." Al Emarah. November 3, 2022. <https://www.alemarahenglish.af/53386-2/>.
- Ghaedi, Monir. 2021. "Dispatches from Afghanistan." DW. August 21, 2021. <https://www.dw.com/en/afghans-narrate-taliban-takeover-on-social-media-fear-solidarity-and-resistance/a-58934997>.
- Gul, Ayaz. 2021. "Pakistan to Host OIC-Led International Meeting on Afghanistan." VOA. December 4, 2021. <https://www.voanews.com/a/pakistan-to-host-oic-led-international-meeting-on-afghanistan/6339510.html>.
- Habibi, Ujang, and Hardinal Pratama. 2021. "Peran Akun Twitter Public Figure Indonesia Dalam Membentuk Opini Publik Tentang Citra Positif Atas Kemenangan Taliban-Afganistan." *Da'wah* 4 (2): 77–80. <https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnatsir.v4i02.110>.
- Haryanto, Agus. 2021. "Di Balik Kemenangan Taliban." Detik News. August 19, 2021. <https://news.detik.com/kolom/d-5687981/di-balik-kemenangan-taliban>.

- Hennida, Citra. 2009. "Diplomasi Publik Dalam Politik Luar Negeri." *Journal Unair: Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 22 (1): 17–23.
- Ikhsan, Muhammad. 2021. "Taliban Cari Celah Biar Konten Tayang Di Medsos." CNN Indonesia. August 20, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210820084845-185-682801/taliban-cari-celah-biar-konten-tayang-di-medsos/2>.
- Imamova, Navbahor. 2022. "Nearly 30 Nations Engage With Taliban at Tashkent Conference." VOA. July 27, 2022. <https://www.voanews.com/a/almost-30-nations-engage-with-taliban-at-tashkent-conference-/6676107.html>.
- Jora, Lucian. 2022. "Digital Diplomacy-Opportunity and Threat for Public Diplomacy." *Political Science International Relations* 19 (1): 145–55. <https://www.academia.edu/2529447/Social>.
- Junaedi, Fajar. 2010. "Relasi Terorisme Dan Media," July, 1–24.
- Katawazai, Ahmad Shah. 2016. "Does More Aid Mean More Corruption in Afghanistan?" *The Diplomat*. September 30, 2016. <https://thediplomat.com/2016/10/does-more-aid-mean-more-corruption-in-afghanistan/>.
- Khuru'in, Irza. 2017. "Tantangan Binadamai: Kegagalan Demokratisasi Pasca Konflik Sipil Di Afghanistan." *Transformasi Global* 3 (1).
- Kompas.com. 2020. "Perjanjian Damai AS-Taliban, Ini 4 Poin Yang Perlu Anda Ketahui." Kompas.Com. March 1, 2020. <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/01/095330770/perjanjian-damai-as-taliban-ini-4-poin-yang-perlu-anda-ketahui?page=all>.
- Kompas.com. 2021. "Setelah Kuasai Afghanistan, Taliban Janjikan Untuk Atasi Perubahan Iklim Dan Keamanan Global Bersama." Kompas.Com. August 26, 2021. <https://www.kompas.com/global/read/2021/08/26/155940270/setelah-kuasai-afghanistan-taliban-janjikan-untuk-atasi-perubahan-iklim?page=all>.
- . 2021. "Taliban Telah Berubah, Jadikan Media Sosial Alat Baru Propaganda Politik Halaman All - Kompas.Com." September 7, 2021. <https://www.kompas.com/global/read/2021/09/07/093554370/taliban-telah-berubah-jadikan-media-sosial-alat-baru-propaganda-politik?page=all>.
- Kumparan News. 2021. "Menlu AS: Taliban Sedang Mencari Legitimasi ." Kumparan News. September 9, 2021. <https://kumparan.com/kumparannews/menlu-as-taliban-sedang-mencari-legitimasi-1wUj9lbvLkL>.
- Lee, Ernesto, Furqan Rustam, Imran Ashraf, Patrick Bernard Washington, Manideep Narra, and Rahman Shafique. 2022. "Inquest of Current Situation in Afghanistan Under Taliban Rule Using Sentiment Analysis and Volume Analysis." *IEEE Access* 10: 10333–48. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3144659>.
- Leonard, Mark. 2002. *Public Diplomacy*. London: The Foreign Policy Centre.
- Machmudi, Yon, Firman Noor, Fakhry Ghafur, Fitriyah Fadilah, Yasminne Nur, Chasif Ascha, Ibrahim Hamdani, Farid Mubarak, Ade Wiharso,

- and Farhan Majiid. 2021. *Era Baru Afghanistan: Invasi Barat Hingga Kemenangan Taliban*. Edited by Yon Machmudi. Jakarta: Gema Insani.
- MoFA Afghanistan. 2022. "Statement by Ministry of Foreign Affairs Regarding Report by Richard Bennett at 77th UNGA Session – Ministry of Foreign Affairs of Afghanistan." October 28, 2022. <https://mfa.gov.af/en/statement-by-ministry-of-foreign-affairs-regarding-report-by-richard-bennett-at-77th-unga-session/>.
- Noorzai, Roshan. 2022. "Taliban Show 'No Commitment to Press Freedom.'" VOA. August 12, 2022. <https://www.voanews.com/a/taliban-show-no-commitment-to-press-free-dom-/6698161.html>.
- Nye, Joseph. 2017. "Soft Power: The Origins and Political Progress of a Concept." *Palgrave Communications* 3 (1). <https://doi.org/10.1057/palcomms.2017.8>.
- Osman, Wazhmah. 2014. "On Media, Social Movements, and Uprisings: Lessons from Afghanistan, Its Neighbors, and Beyond." *Signs* 39 (4): 874–87. <https://doi.org/10.1086/675736>.
- Reuters. 2022. "Afghan Acting PM Calls for Official Recognition of Taliban Administration." Reuters. January 19, 2022. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/afghan-acting-pm-akhund-calls-official-recognition-taliban-administration-2022-01-19/>.
- RSF. 2021. "Afghanistan Has Lost Almost 60% of Its Journalists since the Fall of Kabul." Reporters Without Borders. 2021. <https://rsf.org/en/afghanistan-has-lost-almost-60-its-journalists-fall-kabul>.
- Sahasrad, Herdi, Al Chaidar, Imron Bayhaki, Dedy Tabrani, Mohamad Asrori Mulky, and Muhammad Ridwan. 2021. "Taliban in Afghanistan, Present and Future: In Search of an Inclusive, Peaceful, Welfare and Sovereign Nation State?" *Budapest International Research and Critics Institute - Journal* 4 (4): 8898–8908. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.2874>.
- Schéré, Elizabeth. 2021. "Soft Power-The Underestimated Strategy for Global Influence." *The Fletcher Forum of World Affairs* 45 (2): 41–63.
- Setiaji, Hidayat. 2021. "Kebangkitan Taliban Dan Ancaman Ekonomi Afghanistan." August 18, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210818022356-4-269154/kebangkitan-taliban-dan-ancaman-ekonomi-afghanistan/2>.
- Setowara, Subhan. 2021. "Taliban 2.0." *JawaPos.Com*, August 23, 2021. <https://www.jawapos.com/opini/23/08/2021/taliban-2-0/>.
- Simpson, John. 2021. "Akankah Taliban Membawa Afghanistan Ke Masa Lalu?" BBC News. August 17, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58227537>.
- Statista.com. 2022. "Afghanistan - Growth of The Real Gross Domestic Product from 2010 to 2020." November 2, 2022. <https://www.statista.com/statistics/262059/growth-of-the-real-gross-domestic-product-in-afghanistan/>.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Tangen, Ole. 2021. "Will the Taliban Restrict Internet Access in Afghanistan?" DW. August 30, 2021. <https://www.dw.com/en/will-the-taliban-restrict-internet-access-in-afghanistan/a-59029364>.
- . 2022. "Taliban Eroding Afghanistan's Press Freedoms." DW. July 1, 2022. <https://www.dw.com/en/afghanistan-how-press-freedom-has-crumbled-since-the-taliban-takeover/a-60358683>.
- Tempo.co. 2019. "Taliban Dan Amerika Finalisasi Draft Perjanjian Damai, Apa Isinya?" Tempo.Co. January 27, 2019. <https://dunia.tempo.co/read/1169191/taliban-dan-amerika-finalisasi-draft-perjanjian-damai-apa-isinya>.
- . 2021. "Ini Faktor Kenapa Taliban Bisa Kuasai Afganistan Nyaris Tanpa Perlawanan." August 18, 2021. https://dunia.tempo.co/read/1495729/ini-faktor-kenapa-taliban-bisa-kuasai-afganistan-nyaris-tanpa-perlawanan?page_num=1.
- The Kabul Times. 2022. "National, International Media Should Publish Realities, Farahi." The Kabul Times. December 7, 2022.
- Timberg, Craig. 2021. "Taliban Websites down, WhatsApp Sites Also Cut off: Reports ." The Washington Post. August 20, 2021. <https://www.washingtonpost.com/technology/2021/08/20/taliban-internet-websites-twitter-facebook/>.
- Timberg, Craig, and Christiano Lima. 2021. "Afghanistan Taliban Long Have Used Twitter, WhatsApp as Propaganda, Governance Tools ." The Washington Post. August 18, 2021. <https://www.washingtonpost.com/technology/2021/08/18/taliban-social-media-success/>.
- Transparency. 2020. "2020 Corruption Perceptions Index." <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/afg>.
- U.S Embassy in Qatar. 2020. "Agreement for Bringing Peace to Afghanistan." February 29, 2020. <https://qa.usembassy.gov/agreement-for-bringing-peace-to-afghanistan/?ga=2.230629528.506425306.1664512487-1114429750.1664512487>.
- VOA. 2012. "Perang Di Media Sosial Di Afghanistan Berlanjut." VOA. July 23, 2012. <https://www.voaindonesia.com/a/perang-media-sosial-di-afghanistan-berlanjut/1442954.html>.
- . 2021. "40% Media Afghanistan Tutup Sejak Taliban Kembali Berkuasa." VOA. December 24, 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/media-afghanistan-tutup-sejak-taliban-kembali-berkuasa-/6368303.html>.
- . 2022. "Kebohongan Taliban Tentang Laporan Hak Asasi Perempuan PBB." VOA. September 15, 2022. <https://www.voaindonesia.com/a/kebohongan-taliban-tentang-laporan-hak-asasi-perempuan-pbb/6747798.html>.
- Zaki, M. Reza Syarifudin, and Andrey Sujatmoko. 2021. "Hubungan Taliban Dan Cina Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Teras Law*

Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM 3 (1): 45–54.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/teras-irev.v3i1.10745>.